

**KETERPADUAN PERENCANAAN TATA RUANG KOTA DENGAN
KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR
(Suatu Studi Tentang Pembangunan Stadion Kanjuruhan Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh
Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

Disusun Oleh:

IMRON EDI PURNOMO

0210313031



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2006**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Kota Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi Pada Pembangunan Stadion Kanjuruhan Malang)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suhadak, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Irwan Noor, MA dan Bapak Drs. Sukanto, MS selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Soesilo Zauhar, MS dan Drs. Abdullah Said, MSi, selaku Dosen Pembimbing, atas waktu, kesabaran, bimbingan, dan pengarahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepala dan Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Malang, yang telah membantu dalam pengurusan ijin untuk melakukan penelitian.
5. Kepala dan Staf Badan Perencanaan Kabupaten Malang, atas ijin untuk melakukan penelitian, bantuan dalam pengumpulan data, dan kerjasamanya.

6. Kepala dan Staf Dinas Kimpraswil Kabupaten Malang, atas ijin untuk melakukan penelitian, bantuan dalam pengumpulan data, dan kerjasamanya.
7. Kepala dan Staf Kantor Stadion Kanjuruhan Malang.
8. Masyarakat sekitar stadion serta para pedagang di kawasan stadion kanjuruhan.
9. Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Udiono dan Ibu Utami Rahayu, Mas Iwan, Dek Agung atas Do'a, dukungan, dan kasih sayangnya selama ini.
10. Elzza Armellariea, terima kasih atas Do'a, dukungan, dan cintanya.
11. Teman-teman kos, Badas (suwun komputere Pak Choy), Ocol, Cole, Pak Chenk, Irek (oyo Masbus terus rek)
12. Teman-teman yang membantu dalam seminar proposal (Maya, Agnes, Lutfy, Hanafi, Devi, QQ, Tommy, Linda, Rika) dan teman-teman lain yang telah hadir dalam seminar, terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasamanya.
13. Teman-teman FIA Publik (Ganjil) 2002, terima kasih atas Do'a, dukungan, saran, dan semangatnya. Senang sekali bisa berjumpa dan berteman dengan kalian semua.
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis, semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Amin.

Malang, 02 Desember 2006

Penulis

ABSTRAKSI

IMRON EDI PURNOMO, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, November 2006, *Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Kota Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi Pada Pembangunan Stadion Kanjuruhan Malang)*, Pembimbing: Dr. Soesilo Zauhar, MS; Drs. Abdullah Said, MSi

Pembangunan Nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik secara materiil maupun spiritual dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis. Pembangunan daerah pada era otonomi seperti saat ini diarahkan untuk mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah satu dengan daerah lain, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pendayagunaan potensi dan ruang wilayah yang dimiliki, dengan mengisinya melalui berbagai program pembangunan. Demikian pula dengan Kabupaten Malang, dimana untuk mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah satu dengan daerah yang lain, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah, Pemerintah Kabupaten Malang juga melaksanakan pembangunan diberbagai bidang.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang, dengan mengambil situs penelitian di beberapa instansi pemerintah, yaitu: Badan Perencanaan Kabupaten Malang, Dinas Kimpraswil Kabupaten Malang, dan serta Kantor Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan fokus penelitiannya adalah Rencana Tata Ruang Kabupaten Malang, strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Malang, rencana penetapan kawasan prioritas pembangunan, dan rencana pengembangan transportasi. Serta keterpaduan perencanaan perencanaan pembangunan stadion kanjuruhan malang dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Untuk mengetahui keterpaduan perencanaan tata ruang kota dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Hasil penelitian bahwa pada saat ini Kabupaten Malang Menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2003. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang ini merupakan hasil penyempurnaan dari rencana tata ruang wilayah sebelumnya yaitu RTRW tahun 1998/1999-2009. Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala, yaitu setiap 5 tahun sesuai dengan kondisi di lapangan. Sedangkan untuk memacu perkembangan dan mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah, dalam RTRW Kabupaten Malang, ditetapkan model regionalisasi atau pembentukan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), dimana setiap SSWP akan dikembangkan berdasarkan bidang potensial serta kegiatan yang memungkinkan untuk dikembangkan pada SSWP tersebut.

Mengingat jumlah Kecamatan yang relatif banyak dan tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malang dengan kondisi topografi dan geografis yang berbeda, serta berdasarkan orientasi pelayanan di tiap kecamatan, maka perlu adanya regionalisaasi dengan pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) baru yang sebelumnya

terdiri dari 5 SSWP menjadi 8 SSWP. Pembagian SSWP Kabupaten Malang tersebut meliputi SSWP Kepanjen, SSWP Tumpang, SSWP Ngantang, SSWP Lingkar Kota Malang, SSWP Lawang, SSWP Gondanglegi, SSWP Donomulyo dan SSWP Dampit.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan salah satu wujud nyata pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah pembangunan stadion kanjuruhan Malang. Bangunan stadion yang dibangun diatas tanah seluas 3,5 hektar, dan menghabiskan dana sebesar Rp 50.774.857.900 yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang. Dengan pembangunan stadion tersebut dapat menyerap beberapa tenaga kerja, sebagian besar tenaga kerja yang terserap adalah kesektor pedagang. Dengan pembangunan stadion kanjuruhan tersebut jenis-jenis pekerjaan yang muncul adalah petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas perawatan rumput, petugas perawatan taman, pedagang kaki lima, pedagang asongan, petugas parkir.

Dengan dibangunnya stadion kanjuruhan Malang, juga menimbulkan perubahan pekerjaan pada sebagian masyarakat. Dengan dibangunnya stadion tersebut telah terjadi alih fungsi lahan dimana lahan yang digunakan untuk pembangunan stadion tersebut adalah lahan pertanian. Dengan adanya alih fungsi lahan tersebut tentunya akan membawa dampak pada para petani baik petani pemilik ataupun para buruh tani yang hidup disekitar kawasan stadion tersebut. Dengan dibangunnya stadion tersebut menyebabkan sebagian petani ataupun buruh tani kehilangan mata pencaharian mereka.

Dengan hilangnya mata pencaharian mereka tersebut menyebabkan mereka mencari pekerjaan yang lain, baik itu menjadi pedagang ataupun mencari pekerjaan yang lain. Hal-hal semacam ini tentunya juga harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menyusun RTRW yang menjadi dasar dari pola pengembangan suatu wilayah. Dalam menyusun RTRW tersebut pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat disekitar kawasan pembangunan dimana mereka inilah yang secara langsung merasakan dampak dari adanya suatu pembangunan.

Selain pedagang kaki lima stadion kanjuruhan ini juga berpotensi untuk dijadikan suatu objek pariwisata yang cukup baik. Hal ini tentunya juga harus diperhatikan oleh pemerintah, selain fungsi utama dari suatu pembangunan dalam menyusun suatu rencana pembangunan pemerintah juga harus dapat melihat potensi yang nantinya dapat timbul dengan adanya pembangunan tersebut. Seperti yang terlihat pada stadion kanjuruhan dimana stadion ini memiliki wilayah yang cukup luas serta berada di suatu kawasan pertanian yang cukup subur. Dengan berbagai kelebihan dan keunikan yang terdapat di stadion kanjuruhan ini Apabila dikelola dengan baik tentunya akan banyak menarik orang untuk datang ke stadion kanjuruhan ini, selain berada disuatu wilayah dengan udara yang cukup bersih stadion kanjuruhan ini juga dilengkapi dengan taman bermain ang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sekedar nongkrong ataupun bermain bersama putra-putri mereka.

Dengan demikian dalam melaksanakan pembangunan tentunya pemerintah harus lebih memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan pembangunan, karena masyarakat sekitar kawasan pembangunan inilah yang merasakan secara langsung dampak adanya pembangunan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAKSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perencanaan.....	
1. pengertian Perencanaan.....	9
2. Unsur-Unsur Perencanaan.....	11
3. Manfaat Perencanaan.....	12
4. Jenis Perencanaan.....	13
5. Perencanaan Pembangunan.....	14
6. Ciri-Ciri Perencanaan Pembangunan.....	16
B. Perencanaan Tata Ruang Kota.....	17
1. Tata Ruang.....	17
2. Perencanaan Tata Ruang.....	18
3. Materi Tata Ruang.....	19
4. Pemanfaatan Ruang.....	21
C. Sosial Ekonomi Masyarakat.....	22
1. Sosial Ekonomi.....	22
2. Proses-Proses Sosial.....	23
3. Konsep Masyarakat.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Fokus Penelitian.....	25
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Instrumen Penelitian.....	28
G. Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian Data Penelitian	
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	33
a. Keadaan Geografis dan Administratif.....	33
b. Keadaan Topografi.....	35
c. Keadaan Geologi.....	36
d. Keadaan Iklim.....	37
e. Hidrologi.....	38

f. Jumlah Penduduk.....	38
2. Data Fokus Penelitian.....	39
1. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.....	39
a. Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Malang.....	41
b. Rencana Penetapan Kawasan Prioritas Pembangunan.....	45
c. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi.....	49
2. Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Stadion Kanjuruhan Malang Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar.....	52
a. Keterpaduan Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar.....	52
1. Keterpaduan Dengan Penyerapan Tenaga Kerja.....	53
2. Keterpaduan Dengan Perubahan Pekerjaan.....	55
b. Keterpaduan Dengan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Pengelolaan Sektor Pariwisata.....	57
B. Pembahasan	
1. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.....	60
a. Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Malang.....	62
b. Rencana Penetapan Kawasan Prioritas Pembangunan.....	68
c. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi.....	72
2. Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Stadion Kanjuruhan Malang Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar.....	79
a. Keterpaduan Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar.....	79
1. Keterpaduan Dengan Penyerapan Tenaga Kerja.....	81
2. Keterpaduan Dengan Perubahan Pekerjaan.....	84
b. Keterpaduan Dengan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Pengelolaan Sektor Pariwisata.....	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembangunan Nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik secara materiil maupun spiritual dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis.

Pembangunan Daerah sebagai perwujudan dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta meningkatkan taraf hidup atau perekonomian dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu, baik antar sektor maupun pembangunan sektoral menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Pembangunan daerah diharapkan dapat menempatkan semua daerah dalam posisi yang sama dalam hal keberhasilan pengembangan wilayahnya. Namun, hal ini sangat berbeda dengan fakta yang ada selama ini dimana banyak terdapat ketidakmerataan penyebaran hasil-hasil pembangunan, dalam konteks pengembangan wilayah, adalah pola penyebaran fasilitas-fasilitas perekonomian dan segala aspeknya. Hal ini menegaskan bahwa kepentingan pemerintah pusat yang terpaku pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan tersebut dengan mekanisme *Trickle Down Effect* (efek merembes kebawah), ternyata mengalami kegagalan, dimana pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai tidak diimbangi dengan pemerataan hasilnya.

Akibat dari pembangunan yang tidak merata ini mengakibatkan *Backwash Effect*, yaitu keterlambatan pembangunan di daerah-daerah miskin (Myrdal dalam Sukirno, 1985:14). Akibat dari *Backwash Effect* ini bagi daerah-daerah miskin ini adalah:

1. Mereka akan mengalami banyak kesulitan dalam membangun sector industri dan memperbesar kesempatan kerja. Sebaliknya penduduk di daerah tersebut berkembang lebih cepat dari daerah yang lebih maju, sehingga pendapatan perkapita penduduk akan semakin rendah dan pengangguran meningkat.
2. Mereka akan semakin sulit merubah struktur ekonomi yang tradisional, sehingga senantiasa akan selalu bias ke sektor pertanian, sedangkan untuk membangun sektor industri mengalami kesulitan.
3. Terjadi perpindahan tenaga kerja yang masih muda, berjiwa dinamis dan berpendidikan lebih baik ke daerah-daerah maju, sedangkan yang masih tinggal di daerah miskin hanya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah (Sukirno, 1985:16)

Di pihak lain, daerah maju pada mulanya memang mengalami banyak keuntungan, namun pada akhirnya akan mengalami kesulitan-kesulitan seperti:

1. Karena daerah tersebut terus menampung penduduk dari daerah miskin, maka lama kelamaan daerah tersebut akan menjadi terlalu padat, yang kemudian memaksa pemerintah setempat untuk menciptakan sarana public untuk kebutuhan masyarakat.
2. Daerah-daerah ini akan mengalami masalah-masalah sosial akibat perkembangannya, seperti masalah polusi, kerawanan, keamanan dan sebagainya (Sukirno, 1985:16)

Dilihat dari skala pengembangan wilayah, pengembangan itu dapat berupa skala nasional, skala regional maupun skala lokal. Pengembangan nasional meliputi seluruh Negara dengan tekanan pada perekonomian. Pengembangan lokal meliputi kawasan kecil dengan tekanan pada keadaan fisik. Pengembangan regional meliputi suatu wilayah dan menekankan pada perekonomian dan fisik (Jayadinata, 1999:4)

Setiap pengembangan baik itu pengembangan skala nasional, regional maupun lokal memerlukan suatu perencanaan, mengingat keberadaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah sangat terbatas sedangkan kebutuhan akan sumber-sumber

daya tersebut sangat besar. Tujuannya adalah agar pemanfaatan sumber-sumber daya yang terbatas tersebut dapat efektif dan efisien.

Sedangkan Sadono Sukirno (1985:120) dalam bukunya “Beberapa Aspek Dalam Pembangunan Daerah” mengungkapkan:

“Bahwa melalui perencanaan diharapkan pelaksanaan pengembangan daerah disamping berhasil guna dan berdaya guna juga dapat berkembang sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, melalui perencanaan dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengetahui keadaan ekonomi masyarakat baik di masa lalu, sekarang, masa depan serta akan diketahui pula kemana arah pengembangan itu akan dilakukan di masa yang akan datang”.

Pada hakekatnya dalam perencanaan pembangunan daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya yang tersedia. Sehingga pembangunan daerah harus didasarkan kepada kondisi obyektif yang sesuai dengan spesifikasi, potensi dan sumber daya yang terdapat pada masing-masing wilayah. Dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan dalam pemanfaatan ruang kota atau wilayah.

Untuk itulah pemanfaatan ruang kota harus diatur dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kota dalam perkembangannya tidak mungkin dibiarkan tumbuh dan berkembang secara alamiah yang cenderung bersifat liar. Perkembangan alami yang terjadi pada kota berlangsung sektoral dan masih belum sepenuhnya terarah. Akibatnya hasil-hasil pembangunan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Menghadapi kenyataan tersebut, perkotaan membutuhkan arahan yang lebih jelas agar dapat membantu terciptanya pola-pola pertumbuhan dan perkembangan regional yang lebih merata. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kota di Indonesia tidak merata, disatu sisi ada kota yang perkembangannya sangat pesat, walaupun

perkembangannya kurang teratur dan terarah, namun disisi lain ada kota yang perkembangannya tidak begitu pesat.

Jelaslah bahwa perkotaan perlu dibentuk, diarahkan dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya melalui perencanaan kota agar perkembangannya dapat teratur dan terarah. Akan tetapi dalam perencanaan kota tersebut juga harus memperhitungkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dengan adanya perkembangan kota tersebut. Harus diperhitungkan apakah perkembangan kota tersebut membawa dampak yang baik atau malah membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar.

Dengan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, maka daerah menjadi lebih leluasa untuk mengatur dan mengembangkan sumber dayanya tanpa harus menunggu perintah/kebijakan dari pemerintah pusat, dan dalam hal melaksanakan pembangunan, dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas sumber daya/ potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Demikian pula dengan Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Malang juga melaksanakan berbagai macam pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik.

Salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Malang adalah pembangunan stadion kanjuruhan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Permukiman Kabupaten Malang, stadion ini diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 9 Juni 2004. Stadion ini terletak di jalan raya panarukan-gondang legi, bangunan stadion ini dibangun diatas tanah seluas 3,5 hektar, dan menghabiskan dana sebesar Rp 50.774.857.900,00 bersumber dari APBD Kabupaten Malang. Stadion ini memiliki kapasitas 50.000 penonton untuk kelas ekonomi dan

30.000 penonton untuk kelas VIP. Selain itu bangunan stadion ini juga dilengkapi dengan berbagai sarana antara lain:

1. Ruang wasit
2. Ruang vitnes
3. Ruang pemain
4. Ruang official
5. Mushola
6. Ruang siaran

Pembangunan stadion ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung, sebagai fasilitas pendukung dari pembangunan stadion tersebut juga dibangun kawasan pertokoan yang terdiri dari 80 toko, lapangan parkir seluas 2 hektar, *jogging track*, lapangan luar, selain itu juga terdapat sarana bermain atau taman. Dan untuk fasilitas pemeliharaan, bangunan stadion ini dilengkapi dengan tandon air yang berkapasitas kurang lebih 36.000 liter, dan *splinker* penyiraman antara 10-14 buah *splinker*. Untuk pengembangan kedepannya stadion ini akan dilengkapi dengan *sport center*, kolam renang, serta lapangan olah raga indor dan outdoor.

Dengan pembangunan stadion ini pemerintah Kabupaten Malang berharap akan mampu meningkatkan perekonomian dari masyarakat yang berada atau tinggal disekitar stadion. Seperti yang kita ketahui dengan adanya stadion tersebut akan banyak kegiatan yang akan dilaksanakan disana, misalnya saja diselenggarakan pertandingan sepak bola, dengan adanya pertandingan sepak bola masyarakat sekitar dapat memanfaatkannya untuk mencari nafkah, misalnya dengan menjadi juru parkir, berjualan makanan dan minuman, dan lain-lain. Selain itu dilingkungan stadion juga dibangun kawasan

pertokoan, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam lingkungan stadion ini setiap hari juga terdapat ratusan pedagang kaki lima yang berdagang di lingkungan stadion, akan tetapi dalam perencanaan pembangunan stadion ini tampaknya pemerintah kurang memperhitungkan keberadaan dari pedagang kaki lima tersebut. Hal ini nampak bahwa tidak adanya penataan yang baik untuk pedagang kaki lima tersebut, sehingga keberadaan pedagang kaki lima tersebut terkesan semrawut. Padahal sektor inilah yang banyak menyerap tenaga kerja pada pembangunan stadion ini.

Selain tidak adanya penataan pedagang kaki lima, pada sektor pariwisata pun terkesan tidak ditangani dengan serius, sebenarnya apabila ditangani dengan baik sektor pariwisata ini bisa menjadi suatu objek untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar. Seharusnya pemerintah daerah lebih serius dalam penanganan sektor tersebut, karena sektor ini juga dapat menyerap atau memunculkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Untuk itulah diperlukan adanya perencanaan yang baik dan kebijakan pembangunan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan tata ruang yang tepat dilihat dari potensi daerah. Selain itu dengan adanya perencanaan dan kebijakan yang mengatur tentang pemanfaatan tata ruang tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antar sektor dalam pembangunan daerah, sehingga dapat memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian diharapkan nantinya akan terjadi *“spread effect”* yaitu proses perkembangan dan pembangunan suatu daerah membawa

dampak positif dan bukan “*back wash effect*” yaitu proses perkembangan dalam pembangunan suatu daerah membawa dampak negatif atau kemunduran. (Gunnar Myrdal dalam Tjokroamidjojo, 1987).

B. Rumusan Masalah.

Sesuai dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk lebih mempermudah dalam melaksanakan penelitian, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Malang?
2. Adakah keterpaduan perencanaan pembangunan stadion kanjuruhan Malang dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian.

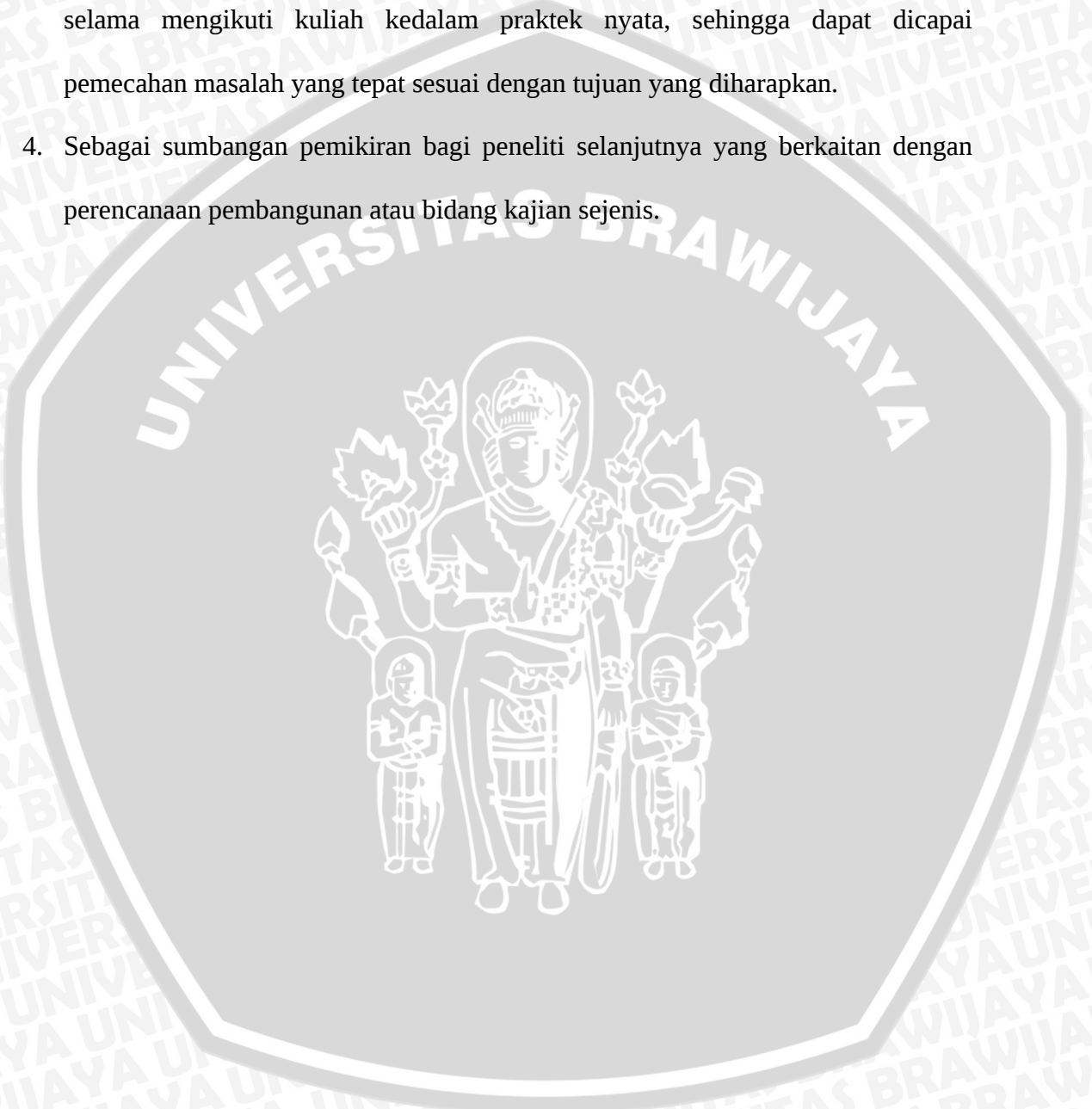
Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti mempunyai suatu tujuan. Oleh karena itu berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata ruang kota Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan keterpaduan perencanaan pembangunan stadion kanjuruhan Malang dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.

D. Kontribusi Penelitian.

1. Dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam membuat program-program perencanaan.

2. Sebagai bahan kajian Ilmu Administrasi Negara terutama sebagai pengembangan studi Perencanaan Pembangunan.
3. Sebagai wahana dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti kuliah kedalam praktek nyata, sehingga dapat dicapai pemecahan masalah yang tepat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
4. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan atau bidang kajian sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan.

1. Pengertian Perencanaan.

Terdapat banyak sekali definisi mengenai perencanaan dimana terlihat berbeda antara definisi satu dengan definisi lainnya. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang, perbedaan fokus perhatian, dan perbedaan luasnya bidang yang tercakup dalam perencanaan itu sendiri (Tarigan, 2004).

Berdasarkan elemen penyusunnya, maka perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijakan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan tersusun secara sistematis (Soekartawi, 1990:4).

Sedangkan Bintoro Tjokroamidjoyo (1987:12), merumuskan perencanaan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses yang mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah rencana bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

Begitu pula dikemukakan oleh Widjoyo Nitisastro dalam Bintoro Tjokroamidjoyo (1987:14);

“Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal: yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki

masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua adalah pilihan diantara cara-cara alternative yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau criteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula”.

Wilson dalam Jayadinata (1992:3), menjelaskan perencanaan sebagai suatu proses yang mengubah proses lain, atau mengubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencana atau oleh orang/badan yang diwakili oleh perencana itu. N. Rode and De Smit dalam Syafrudin (1993:3-4) merangkum beberapa definisi mengenai perencanaan, lima diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah suatu proses integral dalam mempersiapkan dan merumuskan pengambilan keputusan-keputusan di kemudian hari.
2. Perencanaan mencakup perumusan tujuan-tujuan tertentu serta mencakup langkah-langkah yang harus diambil berdasarkan musyawarah dengan pihak pimpinan yang bersangkutan.
3. Perencanaan adalah merancang suatu hari depan yang diinginkan, serta merancang cara-cara yang efektif, yang melalui hal-hal tersebut bias dicapai hari depan tersebut diatas.
4. Perencanaan adalah merancang pengambilan langkah-langkah selanjutnya (strategi-strategi ditambah dengan cara-cara pokok dalam melaksanakan perencanaan yang bersangkutan)
5. perencanaan adalah suatu proses dari menyusun rencana-rencana.

Dari beberapa pengertian atau definisi mengenai perencanaan seperti yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu proses pemikiran yang matang serta penentuan daripada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Dengan demikian dalam perencanaan perlu diketahui lima hal pokok yaitu:

1. Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu Negara/masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya.
2. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai.
3. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternative-alternatifnya yang terbaik.

4. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang kongkrit.
5. jangka waktu pencapaian tujuan. (Tjokroamidjojo, 1987:14)

2. Unsur-Unsur Perencanaan.

Perencanaan diperlukan untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Tjokroamidjojo (1987:15), dalam penetapan dan terutama dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, ada tiga unsure penting dari perencanaan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Perlunya koordinasi.
2. Konsistensi antara berbagai variable social ekonomi suatu masyarakat.
3. Penetapan skala prioritas.

Sedangkan menurut Ibnu Syamsi (1986:134), bahan perencanaan yang baik adalah data dan ramalan (forecasring), oleh karena itu perencanaan yang baik dan lengkap mencakup 6 unsur pokok yaitu:

1. Apa (*what*), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
2. Mengapa (*why*), yaitu alasan memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan.
3. Bagaimana dan Berapa (*how and how Much*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang dibutuhkan, dengan dana yang tersedia.
4. Dimana (*where*), yakni pemilihan tempat yang tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan proyek.
5. Kapan (*when*), yaitu pemilihan waktu/timing yang tepat.
6. Siapa (*who*), menentukan orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.

Dengan demikian perencanaan yang baik harus dapat memberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut:

1. Tindakan apa yang harus dikerjakan?
2. Apa sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?
3. Dimanakah tindakan itu harus dilaksanakan?
4. Kapankah tindakan itu dilaksanakan?
5. Siapakah yang akan mengejakan tindakan itu?
6. Baagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu? (Manullang, 1990:49)

Menurut Manullang (1990:49), dari jawaban-jawaban pertanyaan sebagaimana

telah diuraikan diatas, suatu rencana harus memuat hal-hal berikut:

1. Penjelasan dan perincian kegiatan-kegiatan yang dibutuhkannya, faktor-faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut agar apa yang menjadi tujuan dapat dihasilkan.
2. Penjelasan mengapa kegiatan-kegiatan tersebut harus dikerjakan dan mengapa tujuan yang tertentu itu harus dicapai.
3. Penjelasan tentang lokasi fisik dimana setiap kegiatan harus dikerjakan, dengan demikian tersedia segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu.
4. Penjelasan mengenai waktu dimulainya pekerjaan dan diselesaikannya pekerjaan, baik untuk tiap-tiap pekerjaan maupun untuk seluruh pekerjaan.
5. Penjelasan tentang para petugas yang akan mengerjakan pekerjaanya.
6. Penjelasan tentang teknik pengerjaan pekerjaan (Manullang, 1990:49).

3. Manfaat Perencanaan.

Perencanaan merupakan suatu proses pemikiran yang matang serta penentuan daripada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukuan dimasa yang akan datang. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1987:9) perencanaan dapat dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik. Dengan demikian perencanaan memiliki banyak manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.
3. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan skala pengukuran prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan?evaluasi (BIntoro Tjokroamidjojo, !987:9).

Sedangkan menurut Aji dan Sirait (1990:25) dalam bukunya “Perencanaan dan Evaluasi, Suatu Sistem Untuk Proyok Pembangunan”, menjelaskan beberapa manfaat

yang dapat diperoleh dari perencanaan antara lain dapat disebutkan seperti dibawah ini, yaitu:

1. Terhindarnya pemborosan waktu, uang dan tenaga.
2. Dimungkinkan dilakukan pilihan dari berbagai alternatif tindakan.
3. Dimungkinkan perubahan-perubahan yang perlu pada waktunya.
4. Dimungkinkan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilaksanakan karena tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, dari segi ekonomis perencanaan dapat pula memberikan manfaat yang sangat penting sekali yaitu:

1. Dapat menghindari pemborosan baik waktu, tenaga maupun biaya yang ada, karena diperhatikannya potensi dan sumber yang dimiliki.
2. Perencanaan akan tumbuh dan berkembang secara terus menerus. Hal ini dimungkinkan oleh adanya pemikliran yang dikonsepskan terlebih dahulu mengenai unsure-unsur ekonomi.
3. Berkenaan dengan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka stabilitas ekonomi akan terjamin.
4. Proses kegiatan perekonomian khususnya system pengawasan mudah dilaksanakan karena adanya standar dan target yang telah ditetapkan (Sudriamunawar, 2002:72)

4. Jenis Perencanaan.

Perencanaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, hal ini tergantung dari sudut mana perencanaan itu akan ditinjau. Dengan adanya berbagai sudut pandang tersebut, dalam bagian ini akan diuraikan mengenai jenis perencanaan dari beberapa aspek, yaitu aspek waktu, aspek wilayah dan aspek hierarki. Menurut Aji dan Sirait dari aspek waktu perencanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Perencanaan jangka pendek.
2. Perencanaan jangka menengah, yang dibedakan menjadi:
 - a. Rencana jangka menengah yang kaku (*fixed plan*)
 - b. Rencana yang berkesinambungan (*rolling plan*)
3. Perencanaan jangka panjang. (Aji dan Sirait, 1990: 26-28).

Selanjutnya Bintoro Tjokroamidjojo (1987: 69-71), juga membedakan jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu rencana menjadi tiga pola, yaitu:

- a. Rencana jangka panjang (*long term plan*). Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun ke atas.
- b. Perencanaan pembangunan jangka menengah (*medium term plan*). Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun.
- c. Rencana jangka pendek (*short term plan*). Jangka waktunya antara setengah sampai dengan dua tahun.

Perencanaan dari sudut wilayah, pelaksanaannya berdasarkan suatu batas tertentu yang hasilnya diberikan dan dialokasikan untuk daerah tersebut dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang ada dalam wilayah tersebut. Dengan demikian perencanaan berdasarkan aspek wilayah dapat dibagi menjadi:

1. Perencanaan nasional dengan batas wilayah suatu negara tertentu.
2. Perencanaan daerah yang dapat dibagi dalam:
 - a. Perencanaan daerah perkotaan.
 - b. Perencanaan daerah pedesaan yang masing-masing membahas lebih mendalam aspek-aspek yang ada di kota dan di desa, hubungan dan pengaruhnya terhadap sub sistem lain dalam suatu kerangka sistem yang lebih luas. (Aji dan Sirait, 1984: 28-29).

Sedangkan perencanaan dari sudut hierarki atau tingkatan dibagi menjadi perencanaan tingkat sektor, perencanaan tingkat program, dan perencanaan tingkat proyek (Aji dan Sirait, 1984: 29). Perencanaan tingkat sektor mencakup sektor-sektor yang ditangani dalam pelaksanaan suatu pembangunan, misalnya sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain, yang kemudian diperinci menjadi berbagai program, dan dijabarkan menjadi proyek-proyek pembangunan.

5. Perencanaan Pembangunan.

Sebelum membahas tentang perencanaan pembangunan, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi dari pembangunan. Definisi dari pembangunan dapat kita temukan di berbagai kepustakaan dengan mudah, baik itu kepustakaan dalam maupun luar negeri. Pandangan yang cukup populer mengenai pembangunan diantaranya diungkapkan oleh Todaro yang mengatakan bahwa pembangunan adalah sebuah proses

yang multidimensional tersusun dan terencana secara sistematis yang bertujuan untuk menciptakan suasana dan sistem baru (dalam Hanani, 2003:).

Sedangkan Saul M Kant dalam Hanani (2003:1), menganggap bahwa pembangunan adalah perubahan dari suatu kondisi nasional tertentu kepada kondisi nasional lain yang dianggap lebih menyejahterakan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1994:222), pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik.

Dari berbagai pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang terus menerus, yang dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat menuju suatu keadaan yang dianggap lebih baik dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi politik, sosial dan budaya.

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengerahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan social ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif (Tjokroamidjojo, 1987:12). Sedangkan Albert Waterston menyebutkan perencanaan pembangunan adalah “melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaanya tidak menyimpang dari tujuan” (dalam Tjokroamidjojo, 1987:12).

Berdasarkan definisi dan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah:

1. Melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

2. Memilih diantara berbagai alternatif atau menetapkan skala prioritas sehubungan dengan terbatasnya sumber-sumber pembangunan (Sudriaminawar, 2002:76).

6. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan.

Tidak semua perencanaan maupun rencana-rencana adalah suatu perencanaan pembangunan. Sebenarnya ada beberapa hal yang membedakan suatu perencanaan pembangunan, yaitu dipenuhinya berbagai cirri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1987:49), ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peran pemerintah sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*). Oleh karena itu perencanaan pembangunan umumnya dilakukan oleh Negara-negara berkembang. Namun hal ini tidak menutup kenyataan bahwa banyak Negara lain, terutama sosialis, bahkan Negara maju dengan sektor swasta yang kuat, juga melakukan perencanaan pembangunan.

Untuk memudahkan dalam memahami apakah suatu perencanaan merupakan perencanaan pembangunan, maka dapat dilihat dalam ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh perencanaan pembangunan yaitu:

1. Perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economic growth*).
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
4. Usaha untuk mengadakan perluasan kerja.
5. Usaha untuk mengadakan pemerataan pembangunan.
6. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
7. Usaha sedemikian rupa supaya kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan pada kemampuan nasional.
8. Terdapat usaha terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi.
9. Bersifat jangka panjang (Tjokroamidjojo, 1987:49-52).

Sedangkan Widjojo Nitisastro dalam Sudriaminawar (2002:76), secara jelas memperinci apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan yaitu:

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan yang kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
2. Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

B. Perencanaan Tata Ruang Kota.

1. Tata Ruang.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa Tata Ruang adalah wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Tata Ruang secara harfiah berasal dari kata spatial, yaitu segala sesuatu yang dipertimbangkan berdasarkan keruangan, tegasnya ruang berkaitan dengan penataan penyelenggaraan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai tempat menyelenggarakan kehidupan (Gani, 1995:27).

Oleh karena itu upaya penataan ruang dapat diartikan sebagai usaha pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal, seimbang, serasi, terpadu dan berlanjut.

2. Perencanaan Tata Ruang .

Agar ruang bisa dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, maka terlebih dahulu perlu dilakukan perencanaan tata ruang dan ini menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkannya dalam sebuah kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, Hermin Hardiati (1993: 17) mengungkapkan bahwa: perkembangan perhatian terhadap ruang yang demikian pesatnya tidak hanya dipakai dalam kaitannya

dengan kerangka konseptual dan teori perencanaan wilayah, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan terutama yang terkait dengan perencanaan tata ruang.

Isa Karmisa, cs menyatakan bahwa Perencanaan tata ruang meliputi kegiatan menyusun, menetapkan dan mensahkan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan aspek waktu, modal, optimasi terhadap pembangunan bumi, air, angkasa dan keseimbangan serta daya dukung lingkungan (1992: 236).

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah disebutkan bahwa perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penulisan serta penetapan rencana tata ruang.

Sedangkan penyusunan sendiri pada garis besarnya terdiri dari langkah-langkah kegiatan antara lain:

- a. Menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari berbagai segi, baik ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.
- b. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan.
- c. Perumusan Perencanaan Tata Ruang
- d. Penetapan Perencanaan Tata Ruang (Penjelasan Pasal 13 Ayat 1, UU 24 Tahun 1992).

Pada dasarnya rencana tata ruang tidak saja memuat kebijakan-kebijakan sektoral yang dapat memberikan wadah yang cukup bagi pengembangan wilayah. Tetapi sekaligus memberikan arahan terhadap kelayakan lokasi suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Arahan tata ruang tersebut akan berdampak terhadap sistem keterkaitan banyak sektor yang berpengaruh terhadap pola-pola perkembangan daerah. Oleh sebab

itu rencana tata ruang disusun dengan perspektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan, dengan bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Materi Tata Ruang.

Dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa rencana tata ruang dibedakan menurut administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan. Dengan demikian rencana tata ruang tersebut dibedakan atas:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah daerah kabupaten Malang, oleh karena itu disini akan dijelaskan materi tata ruang untuk wilayah Kabupaten. Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 1992, isi RTRW Kabupaten sama dengan isi RTRW Propinsi, hanya harus diuraikan lebih rinci. Dalam penyusunan RTRW Kabupaten, ada kawasan yang sudah ditetapkan penggunaannya dalam RTRW Nasional dan RTRW Propinsi. Dalam hal ini RTRW Kabupaten harus mempedomi dan menjabarkannya dalam bentuk strategi pengelolaannya. Kabupaten masih memiliki kewenangan menentukan penggunaan lahan untuk lokasi yang tidak diatur secara tegas dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi. Dengan demikian berdasarkan UU No. 24 Tahun 1992 Pasal 22 Ayat 2, materi tata ruang untuk wilayah Kabupaten berisi sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
2. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu.
3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan.
4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan.

5. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Tarigan (2004: 53-62), dalam bukunya “Perencanaan Pembangunan Wilayah”, juga memberikan penjelasan isi ringkas dari RTRW Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan kawasan lindung
Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup.
2. Penetapan kawasan budidaya yang diatur.
Kawasan budidaya adalah kawasan dimana manusia dapat melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan baik sebagai tempat tinggal atau beraktifitas untuk memperoleh pendapatan.
3. Kawasan budidaya yang diarahkan.
4. Kawasan budidaya yang dibebaskan.
Kawasan budidaya yang dibebaskan adalah kawasan yang tidak diatur atau diarahkan secara khusus.
5. Hierarki perkotaan.
6. Pengelolaan kawasan pedesaan.
Pada setiap desa ditetapkan delinitas desa, yaitu wilayah yang dijadikan pemukiman dan wilayah budidaya.
7. Sistem prasarana wilayah.
Jaringan yang menghubungkan suatu pusat kegiatan dengan pusat kegiatan lainnya, antara lokasi budidaya dengan lokasi pemukiman, dan antara lokasi budidaya yang satu dengan lokasi budidaya yang lainnya.
8. Kawasan yang diprioritaskan pengembangannya.
9. Penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya.

RTRW Kabupaten menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang, sehingga pemafaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan.

4. Pemanfaatan Ruang.

Dalam usaha melakukan pembangunan tidak akan terlepas dari penggunaan ruang. Sebagai usaha penggunaan ruang diluar dari fungsi yang sebenarnya maka di Indonesia terdapat UU tentang Penataan Ruang yaitu UU No. 24 Tahun 1992. penataan Ruang dalam UU tersebut diartikan sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat 1 UU No. 24 Tahun 1992 adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang. Selanjutnya dijelaskan dalam Ayat 2 bahwa pemanfaatan ruang tersebut diselenggarakan secara bertahap melalui penyiapan program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Agar pemanfaatan ruang tersebut sesuai dengan rencana tata ruang maka dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penerbitan pemanfaatan ruang (Penjelasan Pasal 17, UU No. 24 Tahun 1992). Tujuan dari kegiatan pengawasan dalam hal ini adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Sedangkan penerbitan adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rencana tata ruang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.

C. Sosial ekonomi masyarakat.

1. Sosial Ekonomi.

Istilah sosial ekonomi sudah menjadi kata majemuk dalam artian dua kata tersebut mempunyai satu arti, walaupun keduanya masing-masing punya arti sendiri. Kata sosial mempunyai makna dan cakupan yang lebih luas. Termasuk didalamnya adalah istilah ekonomi yang selalu dikaitkan dengan sosial. Kata sosial berasal dari kata *socius* yang kemudian membentuk kata sifat sosial, yang dapat diartikan serba berjiwa kawan, serba terbuka untuk orang lain, untuk memberi dan menerima untuk umum (Hendropuspito, 1989).

Dalam kehidupan sosial masyarakat cenderung akan membentuk kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial ini merupakan kumpulan dari orang-orang yang melaksanakan peranan yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang sama (Hendropuspito, 1989). Dengan adanya kelompok sosial ini masyarakat akan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Sedangkan ciri-ciri dari kelompok sosial itu sendiri antara lain:

1. Merupakan kesatuan yang nyata.
2. Mempunyai struktur sosial.
3. Didapati sejumlah peranan sosial.
4. Mempunyai norma-norma kelakuan.
5. Mempunyai kepentingan yang sama (Hendropuspito, 1989).

Sedangkan istilah ekonomi itu sendiri yang selalu dikaitkan dengan istilah sosial seperti yang diungkapkan oleh Max Weber yang dikutip Damsar (1997,19) menetapkan tiga unsur yang menegaskan tentang tindakan ekonomi yaitu:

1. Tindakan ekonomi adalah sosial.
2. Tindakan ekonomi selalu melibatkan makna.

3. Tindakan ekonomi selalu melibatkan kekuasaan.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Swedberg dan Granovotter yang dikutip oleh Damsar (1997, 29) yang menyebutkan 3 proporsi utama tentang sosial ekonomi yaitu:

1. Tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial.
2. Tindakan ekonomi disituasikan secara sosial.
3. Intensitas ekonomi dikonstruksikan secara sosial.

Dari dua pendapat ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa kegiatan sosial ekonomi dimaknai sebagai suatu kegiatan ekonomi yang disituasikan secara sosial dimana dalam wacana ini lebih khusus diarahkan kepada aktivitas ekonomi masyarakat sekitar stadion.

2. Proses-Proses Sosial.

Proses-proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan system serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada Gillin dan Gillin (Soekanto, 1990). Bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada itu disebut interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena itu tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama Young dan Mack (Soekanto, 1990). Suatu interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak ada dua syarat:

1. Kontak sosial.
2. Komunikasi.

Sedangkan kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk:

1. Antara orang perorangan.
2. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya.
3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok lainnya Gillin & Gillin (Soekanto, 1990).

Sehubungan dengan kerjasama, ada tiga bentuk kerjasama, yaitu:

1. *Bargaining*, yaitu perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih.
2. *Co-operation*, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.
3. *Coalition*, adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, Thosoon & Mc Ewen (Soekanto, 1990).

Sedangkan proses-proses sosial itu sendiri dibagi menjadi beberapa klasifikasi seperti yang diungkapkan oleh Hendropuspito (1989) yang mengklasifikasikan proses-proses sosial menjadi beberapa klasifikasi antara lain:

1. Proses sosial asosiatif, proses sosial ini dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain:
 1. Akomodasi.
 2. Asimilasi.
 3. Kerja sama.
2. Proses sosial disosiatif, proses sosial ini juga dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain:
 1. Persaingan.
 2. Persaingan dalam masyarakat barat dan masyarakat timur.

3. Konsep Masyarakat.

Linton (Harsojo, 1982) mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial

dengan batas-batas tertentu. Sedangkan Herskovits (Harsojo, 1982) menulis bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang mengikuti cara hidup tertentu. Gilin dan Gilin (Harsojo, 1982) mengatakan bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.

Adapun ciri-ciri dari masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Hendropuspito (1989) antara lain:

1. Memiliki wilayah dan batas yang jelas.
2. Merupakan satu kesatuan penduduk.
3. Terdiri atas kelompok-kelompok fungsional yang heterogen.
4. Mengemban fungsi umum.
5. Memiliki kebudayaan yang sama.

Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat dibentuk oleh orang-orang yang hidup dalam kelompok-kelompok sosial dari bermacam-macam satuan sosio-budaya namun bersedia membentuk landasan kebudayaan baru yang sama, yang memungkinkan dikembangkannya semua potensi yang ada di dalamnya mewujudkan hidup bersama yang lebih sempurna dalam segala aspeknya. Dalam kehidupan bermasyarakat ini masyarakat mempunyai beberapa tugas pokok antara lain:

1. Melestarikan eksistensi penghuninya sebagai satu bangsa yang sejahtera.
2. Mengatur pembagian tugas.
3. mempersatukan warga masyarakat (Hendropuspito, 1989).

Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa diatas bumi yang kita huni ini terdapat bermacam-macam masyarakat manusia, misalnya saja dinegara kita, dengan sepintas saja kita dapat memperoleh gambaran umum bahwa masyarakat indonesia bukan masyarakat yang seragam. Masyarakat kita terdiri dari berbagai macam klasifikasi masyarakat. Dan

untuk mempermudah kita dalam mengklasifikasikan masyarakat berikut ini adalah klasifikasi jenis masyarakat:

1. Masyarakat sederhana dan masyarakat maju.
2. Masyarakat ekonomi.
3. Masyarakat agama.
4. masyarakat totaliter dan masyarakat demokrasi (Hendropuspito, 1989).

Apabila diteliti lebih dalam, maka eksistensi masyarakat itu timbulnya mungkin oleh interaksi sosial, yang oleh Park dan Burges (Harsojo, 1982) dianalisis sebagai proses-proses sosial. Menurut kedua ahli sosiologi itu, interaksi sosial itu jika dianalisis sebagai proses-proses sosial dapat diklasifikasikan dalam enam kategori, yaitu komunikasi, konflik, kompetisi, akomodasi, asimilasi, dan kooperasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi (menemukan) dan klarifikasi (menjelaskan) mengenai fenomena-fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti (Faisal, 1995:15).

Hal senada juga diungkapkan oleh Moh. Nasir (2003:54) mengenai penelitian deskriptif, yaitu:

“suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi dan kondisi, suatu pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau likisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena yang diselidiki”.

Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka penelitian deskriptif ini akan digunakan untuk mendiskripsikan tentang keterpaduan perencanaan tata ruang kota dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar stadion kanjuruhan malang.

B. Fokus Penelitian.

Fokus penelitian mengungkapkan tentang penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Penetapan fokus penelitian tersebut memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Membatasi studi, yang berarti bahwa dengan adanya fokus akan membatasi bidang inkuiri.

2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi criteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk keluar suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (Moleong, 2004,94).

Dengan demikian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tata ruang wilayah Kabupaten Malang.
 - a. Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Malang.
 - b. Rencana penetapan kawasan prioritas pembangunan.
 - c. Rencana pengembangan transportasi.
2. Keterpaduan perencanaan pembangunan stadion Kanjuruhan Malang dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.
 - a. Keterpaduan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.
 1. Keterpaduan dengan penyerapan tenaga kerja.
 2. Keterpaduan dengan perubahan pekerjaan.
 - b. Keterpaduan dengan penataan pedagang kaki lima dan pengelolaan sektor pariwisata

C. Lokasi Dan Situs Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Sedangkan situs penelitian menunjuk pada letak dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang ditelitinya. Dengan demikian yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian ini adalah kota Kepanjen, dimana di kota kepanjen ini terletak stadion kanjuruhan yang menjadi objek dari penelitian ini, selain itu peneliti juga mengambil situs penelitian di beberapa instansi pemerintah, yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

2. Dinas Kimpraswil Kabupaten Malang.
3. Kantor Stadion Kanjuruhan Malang.
4. Masyarakat sekitar stadion Kanjuruhan Malang.

D. Jenis Dan Sumber Data.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Sedangkan sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sebagai berikut:

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau dari sumbernya. Data ini nantinya diperoleh secara langsung dilapangan melalui:

- a) Kepala dan para Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
- b) Kepala dan para Staf Dinas Kimpraswil Kabupaten Malang.
- c) Kepala dan para Staf Kantor Stadion Kanjuruhan Malang.
- d) Masyarakat sekitar Stadion Kanjuruhan Malang.

Data Sekunder, diperoleh dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya, berupa dokumen, arsip, laporan catatan, dan lain-lain. Data sekunder ini dipergunakan untuk melengkapi data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara.

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan

memberikan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dengan responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Dalam hal ini terdapat dua jenis wawancara yaitu:

- a. Wawancara terstruktur: wawancara yang pewawancaranya telah dibekali daftar pertanyaan yang akan diajukan pada pihak terwawancara, berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Wawancara tidak terstruktur: jenis wawancara dimana pewawancara menentukan sendiri pertanyaan yang diajukan pada pihak terwawancara. Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan apabila pewawancara ingin mengetahui sesuatu secara lebih mendalam lagi pada fenomena yang sedang diteliti.

2. Dokumentasi.

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, laporan, arsip-arsip yang ada. Dengan teknik pengumpulan ini maka akan memudahkan dalam mendapatkan data-data yang diperlukan dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang ada ditempat penelitian untuk dijadikan data sekunder.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data di lapangan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Penggunaan teknik ini akan membantu saat peneliti merasa ragu-ragu dengan data yang telah dikumpulkan. Dengan langsung

mengamati objek yang diteliti, peneliti dapat memperoleh satu kebenaran yang berasal dari pengamatan sendiri.

F. Instrumen Penelitian.

Instrument penelitian merupakan alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dengan demikian instrument yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Peneliti sendiri sebagai instrumen utama.
- b) Pedoman wawancara atau *interview guide*, yaitu daftar pertanyaan untuk memandu wawancara.
- c) Catatan lapangan atau *field note*. Catatan kecil selama berada di lapangan untuk mencatat semua informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Analisis Data.

Analisa data menurut Moleong (2000:103) adalah proses mengorganisasikan dan megurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Pada penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisa secara kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh sesuai dengan latar alamiah, yang disampaikan dalam bentuk apa adanya.

Adapun metode yang digunakan dalam analisa data adalah:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang terdapat dilapangan, hal ini bertujuan mempertajam, menggolongkan, menyortir, dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk paling umum yang digunakan adalah teks uraian.
3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi, merupakan ahir dari kegiatan analisis berupa penarikan kesimpulan dengan cara meninjau ulang data-data yang diperoleh dilapangan agar data tersebut valid (Miles dan Hiberman, 1988:15)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENYAJIAN DATA PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Keadaan Geografis dan Administrasi

Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi bagian tengah Propinsi Jawa Timur. Kawasan ini dikelilingi oleh pegunungan, yaitu pegunungan Tengger di sebelah timur yang memiliki dua pegunungan terkenal, yakni Gunung Bromo dan Gunung Semeru (3.676m) yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Kawi dan Gunung Kelud disebelah barat serta Gunung Arjuna dan Welirang dibagian utara. Sedangkan untuk posisinya terletak pada ordinat $112^{\circ} 17' 10.9''$ - $112^{\circ} 57' 0.0''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44' 55.11''$ - $8^{\circ} 26' 35.45''$ Lintang Selatan. Dengan luas wilayah Kabupaten Malang adalah 334.787 Ha. Kabupaten Malang secara keseluruhan terdiri dari 33 kecamatan yang tersebar pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Secara rinci terdiri dari, 112 kelurahan, 378 desa, 2.953 rukun warga, dan 14.665 rukun tetangga.

Sedangkan secara administrasi, batas-batas wilayah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kota Batu, Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Pasuruan.
2. Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo dan Lumajang.
3. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia.
4. Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kediri.

Kabupaten Malang memiliki luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi, dari 38 Kabupaten/ Kota di wilayah propinsi Jawa Timur. Luas Kabupaten Malang tersebut adalah 351.456,99 km². Dari seluruh total tersebut sekitar 54,93% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian (tegalan,sawah,perkebunan), sedangkan pemanfaatan untuk pemukiman penduduk baru sekitar 13,71%.

Kabupaten Malang merupakan pemerintahan kabupaten yang cukup unik bila dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di Propinsi Jawa Timur. Jumlah penduduknya cukup banyak dengan wilayah yang sangat luas, sumber daya almanya yang bervariasi didukung dengan iklim yang relatif sejuk. Roda pemerintahannya berjalan cukup lancar dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi derap pembangunan. Pencapaian kemajuan Kabupaten Malang dapat dicermati dengan meningkatnya status perkembangan desa, dimana mulai tahun 1990 semua desa di Kabupaten Malang telah mencapai tingkat Swasembada.

Kabupaten Malang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan tahun 2005-2010. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan bermitra dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang memiliki jumlah anggota sebanyak 45 orang anggota dari unsur Partai Politik, terdiri dari unsur pimpinan, 4 fraksi dan 4 komisi. Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh unsur Aparatur Daerah sebanyak 17.235 PNS yang tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 14 Dinas, 8 Badan, 1 Kantor, 1 satuan 1 Badan Pelayanan Umum (BLU).

b. Keadaan Topografi

Sesuai dengan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Malang berlokasi di daerah pegunungan dan kondisi topografinya dipengaruhi langsung oleh pegunungan Tengger di sebelah timur, Gunung Kawi dan Gunung Kelud di sebelah Barat serta Gunung Arjuna dan Welirang di bagian Utara. Wilayah yang topografinya dipengaruhi oleh pegunungan umumnya adalah bagian wilayah kabupaten yang berada pada wilayah pinggiran. Sedangkan ditinjau dari ketinggian wilayah Kabupaten Malang terletak antara 0 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut dan menunjukkan keadaan yang bervariasi yaitu kondisi landai sampai kondisi pegunungan. Wilayah yang datar sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, dan Pakisaji, serta sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, dan Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah yang terjal atau perbukitan sebagian besar terletak di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading, dan Tirtoyudo.

Dengan kondisi topografi yang beragam tersebut, memberikan berbagai macam keuntungan bagi Kabupaten Malang, antara lain adalah terdapat banyak potensi-potensi lokal yang menjadi komoditi serta menjanjikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Baik itu berasal dari sumber daya alamnya, maupun sumber daya perairan yang berupa kawasan pantai sebagai daerah tujuan wisata alternatif di wilayah Jawa Timur. Dan dengan kondisi topografi yang ditunjukkan diatas juga membuat pola pemukiman tertentu pada penduduk di wilayah ini, pada umumnya kawasan pemukiman penduduk

terpusat pada daerah-daerah yang memiliki ketinggian rata-rata atau datar, serta daerah yang mendekati ibukota kecamatan. Hal ini dikarenakan daerah-daerah tersebut memiliki akses yang lebih baik dalam berbagai hal diantaranya adalah transportasi, komunikasi, perdagangan, dan mobilitas penduduk dalam berbagai hal lain.

c. Keadaan Geologi

Ditinjau dari struktur geologinya, Kabupaten Malang menunjukkan sebagian besar wilayahnya terbentuk dari hasil gunung api kwartet muda yang meliputi areal seluas 148.152,52 Ha atau 44,25% dari seluruh luas Kabupaten Malang sedangkan sebagian kecil adalah miosen facies baru gamping dengan luas 90.884,00 Ha atau 27,15% dari seluruh luas Kabupaten Malang. Dari keadaan geologi ini, Kabupaten Malang kaya akan berbagai bahan tambang antara lain adalah kapur, pasir, onyx, gamping dan lain sebagainya. Dimana sebagian besar bahan-bahan galian itu telah dimanfaatkan sebagai salah satu bahan dasar dalam berbagai industri.

Tabel 4.1
Luas Daerah Berdasarkan Struktur Geologi
Di Kabupaten Malang

No.	Struktur Geologi	Luas	
		Ha	%
1.	Hasil gunung api kwartet muda	145.152,52	44,25
2.	Hasil gunung api kwartet tua	41.741,61	12,47
3.	Miosen facies gamping	90.884,00	27,15
4.	Miosen facies sedimen	12.834,00	3,83
5.	Alivum	40.135,87	11,99
6.	Waduk	1.039,00	0,31
	Jumlah	334.787,00	100,00

Sumber: Hasil Penghitungan Peta Geologis, 2003.

Ditinjau dari table 4.1 tersebut diatas, dapat kita lihat bahwasanya sebagian besar wilayah Kabupaten Malang yang memiliki luas total 334.787,00 Ha, terbentuk dari hasil gunung api kwartet muda, yaitu sebesar 44,25% atau seluas 145.152,52 Ha. Dan luas

yang kedua lebih banyak dibentuk dari Miosen facies gamping, yakni sekitar 90.884 Ha. Berdasarkan penghitungan itu, kita bisa melihat bahwa posisi Kabupaten Malang yang dikelilingi oleh daerah pegunungan ternyata membawa akibat pada struktur geologinya. Dan wilayah lainnya yang memiliki luas lebih kecil terbentuk dari unsur hasil gunung api kwartet tua, miosen facies sediment, alivium, yang apabila kita jumlah sekitar 28,29%. Dan jumlah perairan darat yang terdiri dari waduk seluas 1.039 Ha menempati luas yang paling kecil. Kabupaten Malang seperti yang kita ketahui memiliki beberapa waduk antara lain waduk Karangates dan Selorejo, yang juga dimanfaatkan sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air.

d. Keadaan Iklim

Keadaan cuaca di Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara 18,25 °C sampai dengan 31,45 °C (suhu rata-rata dari empat stasiun pengamat cuaca antara 23 °C sampai 25 °C). tekanan udara yang paling tinggi dari empat stasiun pengamat cuaca terjadi di Singosari 1.012,70 dan yang lain masih di bawah angka tersebut. Kelemahan udara yang diteliti lewat keempat stasiun, stasiun lawang 2.423 adalah menunjukkan angka tertinggi 84% dan rata-rata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 Km/jam. Untuk curah hujan di Kabupaten Malang rata-rata per tahun 1.596 mm dengan hari hujan 84,85 per tahun, curah hujan turun antara April – Oktober. Diantara kedua musin tersebut ada musim peralihan antara bulan April – Mei dan Oktober – November.

e. Hidrologi

Kabupaten Malang dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak sungai, anak-anak sungai yang ada sebagian dari Kali Brantas dan Kali Konto, sungai-sungai tersebut ada

beberapa yang masuk di waduk-waduk Karangates dan Selorejo. Ada juga yang masuk Samudra Indonesia dan Laut Jawa. Dari data yang ada di Kabupaten Malang terdapat 588 mata air dengan debit 1 sampai di atas 200 liter/detik. Debit tertinggi terdapat di Wendit Kecamatan Pakis yakni 1.100 liter/detik. Sedangkan kecamatan yang memiliki debit air lebih dari 200 liter/detik adalah mata air yang ada di Singosari, Tumpang, Pakis, Gondanglegi, Sumberpucung, Ngajum, Wagir, Dampit dan Ampelgading.

f. Jumlah Penduduk

Pada Kabupaten Malang yang memiliki 33 kecamatan jumlah penduduknya bisa dikatakan memiliki cukup besar dan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 1997 jumlah penduduknya sebanyak 2.258.388 jiwa. Setahun berikutnya jumlah penduduk mengalami penurunan sekitar 6.000 jiwa menjadi 2.190.563 jiwa. Tahun 1999 jumlah penduduk mengalami kenaikan menjadi 2.201.000 jiwa. Dua tahun berikutnya juga mengalami peningkatan sekitar 2.000 jiwa pertahun. Yakni 2.224.000 jiwa pada tahun 2000 dan 2.242.712 jiwa pada tahun 2001. sebuah jumlah yang seimbang dengan luas wilayah Kabupaten Malang yang sekitar 334.787 Ha.

Dari 33 kecamatan yang ada, penyebaran penduduk cukup merata. Namun ada kecamatan-kecamatan tertentu yang memiliki jumlah penduduk yang padat seperti Singosari yang pada tahun 2001 berpenduduk 129.200 jiwa dengan luas wilayah 10.575 Ha. Disusul dengan kecamatan Dampit dan Turen yang masing-masing dihuni oleh 117.210 jiwa dan 104.992 jiwa. Sedangkan ada beberapa kecamatan yang justru memiliki penduduk yang relatif lebih sedikit dari kecamatan lain, yaitu Kasembon,

kromengan dan Tajinan yang masing-masing pada tahun 2001 memiliki penduduk 29.030 jiwa, 38.741 jiwa, dan 46.125 jiwa.

Sebagian besar penduduk yang berada diwilayah Kabupaten Malang memiliki profesi yang heterogen, mulai dari petani, pedagang, penyedia jasa, Pegawai Negeri atau menjadi tenaga kerja di sektor-sektor industri. Khusus untuk tenaga kerja yang bergerak di sektor industri pada tahun 2003, sebanyak 15.029 orang terserap dalam lapangan kerja, khususnya pada perusahaan berskala besar yang bergerak pada industri makanan, minuman, dan tembakau. Dimana perusahaan pengolahan tembakau menyerap tenaga kerja yang terbesar yakni 5.797 orang.

2. Data Fokus Penelitian.

1. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Nasional, ruang wilayah Propinsi, ruang wilayah Kabupaten/ Kota yang mencakup kawasan-kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan tertentu, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Perencanaan Tata Ruang Wilayah berisikan tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan umum, kebijakan operasional, dan kebijaksanaan pemantapan kawasan lindung, kawasan budaya dan strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang Tahun 2003 merupakan hasil penyempurnaan dari rencana tata ruang wilayah sebelumnya (RTRW Tahun 1998/1999-2009). Berdasarkan RTRW Tahun 2003 tersebut, peninjauan kembali

dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk:

1. Menyiapkan produk Rencana Tata Ruang Wilayah yang akomodatif, aspiratif, fleksibel, dan dapat diterima oleh masyarakat luas.
2. Mempertahankan fleksibilitas dan kedinamisan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan wilayah dan kota-kota di masa mendatang.
3. Mendayagunakan produk rencana sebagai alat untuk menyusun program pembangunan secara optimal dalam jangka waktu 10 tahun dan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang secara tepat.

Hal ini didukung oleh pendapat bapak Ir. Agus Prayitno, MT selaku Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Kabupaten Malang, yaitu:

“Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun, namun dalam jangka waktu tersebut bisa saja dilakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan terhadap rencana tata ruang tersebut (revisi), dimana biasanya kegiatan ini dilakukan setiap lima tahun sekali. Adapun tujuan dari penyempurnaan rencana tata ruang tersebut adalah untuk menyiapkan suatu produk tata ruang yang dapat diterima oleh masyarakat luas, lebih akomodatif dan fleksibel, dimana rencana tata ruang tersebut disusun berdasarkan potensi dan kondisi wilayah pada saat ini” (Wawancara hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2006, pukul 9. 30 WIB, di Kantor Badan Perencanaan Kabupaten Malang).

Dengan demikian pada saat ini Kabupaten Malang menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2003, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah ini disahkan dengan Perda Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2003, tentang Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2003. Adapun secara garis besar Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang tahun 2003 tersebut meliputi: kawasan perkotaan,

kawasan pedesaan, dan kawasan tertentu. Sedangkan penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

a. Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Malang.

Untuk memacu perkembangan wilayah dan untuk mengurangi adanya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, maka dalam dimensi ruang perlu diupayakan untuk mendorong perkembangan wilayah dan bidang yang potensial yang ada pada tiap wilayah. Perkembangan wilayah ini akan lebih mudah dicapai bila setiap wilayah memiliki satu pusat layanan sosio-ekonomi, sehingga perkembangan wilayah pusat diharapkan akan dapat menjangkarkan pada wilayah hinterlandnya atau bawahannya melalui proses *trickling down effect* (proses penjarangan pusat pelayanan dari tingkat lebih tinggi atau kecamatan ketingkat lebih rendah atau desa). Bila proses ini dapat berlangsung dengan baik, maka masalah perkembangan ekonomi wilayah dan pemerataan hasil pembangunan akan lebih mudah tercapai.

Secara konsepsional hal ini akan dapat dilakukan dengan menetapkan struktur tata ruang wilayah yang ideal, dengan menetapkan perkotaan-perkotaan sebagai pusat perkembangan (pusat SSWP) yang diharapkan mampu mendorong wilayah sekitarnya. Pada umumnya perkotaan ini merupakan perkotaan terbesar diwilayahnya, lokasinya cukup sentral, dan memiliki bidang/kegiatan tertentu yang dapat memacu perkembangan wilayah sekitarnya. Perkotaan inilah yang nantinya akan menjadi penentu perkembangan bagi wilayah sekitarnya, sehingga perbedaan perkembangan antar wilayah akan dapat dicegah, paling tidak dikurangi tanpa harus megorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Dalam RTRW Kab. Malang Th. 2003 dijelaskan untuk mencapai hal ini, maka dalam struktur tata ruang wilayah ditetapkan model regionalisasi, atau pembentukan sub-satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), dimana setiap SSWP memiliki wilayah pendukung, dan pusat SSWP ini diberi kelengkapan berupa fasilitas penunjang sosial-ekonomi dalam skala pelayanan sub regional. Wilayah pusat ini harus memiliki aksesibilitas yang tinggi pada wilayah sekitarnya dan Kota Malang sebagai pusat SWP-nya.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Ir. Agus Prayitno, MT selaku Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Kabupaten Malang, yaitu:

“Bahwa dengan diterapkannya model regionalisasi atau pembentukan SSWP ini diharapkan perkembangan ekonomi wilayah dan pemerataan hasil pembangunan akan lebih mudah dicapai karena dengan diterapkannya SSWP diharapkan perkembangan wilayah pusat akan menjalar pada wilayah bawahannya melalui proses trickling down effect”. (Wawancara hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2006, pukul 9. 45 WIB, di Kantor Badan Perencanaan Kabupaten Malang).

Sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten Malang yang sebelumnya terdiri dari 35 kecamatan, akhirnya berkurang dengan terbentuknya Kota Batu yang terdiri dari (Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji). Selain itu pada tahun 1999 terjadi pembagian wilayah Gondanglegi menjadi 2 wilayah yaitu kecamatan Gondanglegi sendiri dan Kecamatan Pagelaran. Dengan adanya perubahan batas administrasi tersebut maka saat ini Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan. (RTRW Kab. Malang Th. 2003)

Mengingat jumlah Kecamatan yang relatif banyak dan tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malang dengan kondisi topografi dan geografis yang berbeda, serta berdasarkan orientasi pelayanan di tiap kecamatan, maka perlu adanya regionalisaasi

dengan pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) baru yang sebelumnya terdiri dari 5 SSWP menjadi 8 SSWP. Pembagian SSWP Kabupaten Malang tersebut meliputi SSWP Kepanjen, SSWP Tumpang, SSWP Ngantang, SSWP Lingkar Kota Malang, SSWP Lawang, SSWP Gondanglegi, SSWP Donomulyo dan SSWP Dampit. Strategi pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) berdasarkan RTRW Kabupaten Malang Th. 2003 adalah sebagai berikut:

1. Pembagian SSWP berdasarkan kesamaan topografi dan geografis agar wilayah pusat dan kecamatan hinterlandnya mudah berinteraksi dan tidak ada pemisah
2. Berdasarkan pada kondisi dan pengaruh pelayanan di sekitarnya
3. Berdasarkan pada kemampuan memberikan pelayanan dan kemudahan memperoleh jangkauan pelayanan

Hal ini didukung pula oleh pendapat bapak Ir. Agus Prayitno, MT selaku Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Kabupaten Malang, yaitu:

“Sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten Malang pada saat ini, dimana ada beberapa wilayah yang memisahkan diri (Batu) dan ada pula yang mengalami pemekaran maka dibentuklah SSWP baru, yang sebelumnya berjumlah lima SSWP (Malang Utara, Malang Timur, Malang Selatan, Malang Tengah, dan Malang Timur Selatan), sekarang menjadi delapan SSWP. Pembentukan atau pembagian SSWP ini dilakukan berdasarkan kesamaan kondisi geografis, potensi, dan berdasarkan pertimbangan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh dan memberikan pelayanan” (Wawancara hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2006, pukul 10.00 WIB, di Kantor Badan Perencanaan Kabupaten Malang).

Sesuai dengan penetapan orde perkotaan untuk wilayah Kabupaten Malang, maka sistem tata ruang di kabupaten Malang dibagi menjadi 8 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Masing-masing pusat SSWP akan memiliki fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan

kegiatan dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Berikut ini perwilayahan pembangunan di Kabupaten Malang:

1. SSWP Lingkar Kota Malang, dengan pusat SSWP di Kota Malang. Adapun kecamatan pendukungnya adalah Dau, Karangploso, Singosari, Pakisaji, Wagir, Tajinan, Bululawang dan Pakis
2. SSWP Lawang, yaitu hanya terdiri dari Kecamatan Lawang. Wilayah pengembangan ini hanya terdiri dari Kecamatan Lawang dan menjadi wilayah pengembangan tersendiri karena wilayah ini mampu melayani wilayahnya sendiri.
3. SSWP Ngantang, dengan pusat SSWP di Kecamatan Ngantang. Adapun kecamatan pendukungnya adalah Pujon dan Kasembon.
4. SSWP Tumpang, dengan pusat SSWP di Kecamatan Tumpang. Adapun kecamatan pendukungnya adalah Poncokusumo, Wajak dan Jabung.
5. SSWP Dampit, dengan pusat SSWP di Kecamatan Dampit. (ekonomi) dan Turen (Sosial). Adapun kecamatan pendukungnya adalah Sumbermanjing Wetan, Ampelgading, dan Tirtoyudo.
6. SSWP Kepanjen, dengan pusat SSWP di Kecamatan Kepanjen. Adapun kecamatan pendukungnya adalah Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, dan Kalipare.
7. SSWP Gondanglegi, dengan pusat SSWP di Kecamatan Gondanglegi. Adapun kecamatan pendukungnya adalah Gedangan, Pagelaran, Bantur.
8. SSWP Donomulyo, yaitu hanya terdiri dari Kecamatan Donomulyo dan wilayah ini ditetapkan sebagai SSWP tersendiri.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian Sub Satuan Wilayah Pembangunan Kabupaten Malang ini, dapat pula dilihat pada peta pembagian SSWP Kabupaten Malang pada lampiran 1.

b. Rencana Penetapan Kawasan Prioritas Pembangunan.

Berdasarkan kondisi dan potensi di Kabupaten Malang, wilayah dan bidang yang diperkirakan memerlukan pengembangan dan perencanaan, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang Tahun 2003, adalah sebagai berikut:

a. Wilayah yang memiliki prospek pengembangan yang tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian sendiri. Yang termasuk kawasan prioritas ini adalah:

1. Menurut rencana pengembangan jaringan jalan di wilayah Propinsi Jawa Timur. Salah satu program pembangunan jalan yang penting di Jawa Timur adalah pengembangan jalan tol antara Gempol-Malang.
2. Pengembangan jalan lingkaran barat untuk mengatasi kemacetan Lawang-Singosari.
3. Pembangunan jalan lintas selatan agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat menyamai perkembangan wilayah pantura.
4. Pengembangan jalur wisata yang menghubungkan zona-zona wisata di Kabupaten Malang.
5. Peningkatan kondisi jalur lintas timur (Pakis-Tumpang-Poncokusumo-Wajak-Turen) dan pengembangan jalur lintas barat (Pujon-Dau- Kepanjen).

b. Wilayah yang termasuk tertinggal/ terisolasi atau kurang berkembang dan masyarakatnya relatif terbelakang. Wilayah ini terutama terdapat pada Kabupaten Malang bagian selatan.

- c. Wilayah yang memiliki kawasan yang rawan baik rawan bencana maupun rawan daya dukung tanah atau alamnya. Wilayah ini terdapat pada sebagian wilayah; Kecamatan Jabung, Poncokusumo, Tumpang, Ngantang, Pujon, Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Bantur, Pagak, Donomulyo, Kalipare, Wagir, dan sepanjang Pantai Selatan.
- d. Kawasan dengan fungsi lindung yang mempunyai potensi terjadinya konflik penggunaan tanah akibat peralihan fungsi lahan seperti: wilayah pesisir pantai, hutan di sepanjang hutan utama, sawah pada jalan arteri, dan sebagainya.
- e. Kawasan yang strategis dan memberikan prospek pengembangan yang baik bagi bidang-bidang dan komoditi unggulan. Peninjauan terhadap bidang yang potensial dan mempunyai kaitan erat dengan pengembangan wilayah adalah bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri (pengolahan komoditi-komoditi unggulan).
- f. Meningkatkan akses transportasi laut. Kawasan yang diprioritaskan adalah pengembangan pelabuhan yang beralokasi pada Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
- g. Kawasan strategis pengembangan jalur wisata yang memiliki prospek pengembangan baik di SSWP Tumpang (empat kecamatan) dimana kawasan ini menghubungkan Kota Malang dengan sederetan objek wisata hingga berakhir di Gunung Bromo.

Sedangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang tahun 2003 juga diatur mengenai kawasan budidaya, dimana dalam RTRW tersebut (berdasarkan Keppres No. 57/ 1989), dijelaskan bahwa kawasan budidaya adalah

kawasan yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan guna keperluan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian kawasan budidaya tersebut merupakan kawasan yang diharapkan dapat menampung semua kegiatan masyarakat, pemerintah, dan swasta dengan tetap mempergunakan asas pemanfaatan tanah, yaitu lestari, optimal dan seimbang/ serasi (LOS). Adapun klasifikasi kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Malang Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan terbangun pemukiman perkotaan, yaitu wilayah yang dimanfaatkan untuk pemukiman, sarana dan prasarana umum, perdagangan, industri, perkantoran, dan kawasan fungsional yang terikat langsung dengan kehidupan dalam suatu permukiman, misalnya kawasan pemukiman perkotaan.
2. Kawasan terbangun pemukiman pedesaan.
3. Kawasan terbangun bukan untuk permukiman atau kegiatan, yaitu wilayah yang dimanfaatkan untuk bangunan yang bukan berfungsi sebagai pemukiman/ kegiatan manusia. Misal: kawasan hijau, saluran pembuangan, dan pertamanan.
4. Kawasan khusus, yaitu kawasan terbangun yang dimanfaatkan untuk fungsi khusus, misalnya kawasan Hankam, pelabuhan udara, laut, dan lain-lain.
5. Kawasan tidak terbangun untuk kegiatan usaha, yaitu wilayah yang tidak dimanfaatkan untuk bangunan kecuali kegiatan usaha dan perlengkapannya. Contoh: kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Mengingat kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Malang terbatas, maka usaha-usaha pembangunan dan pengembangan wilayah atau kawasan tersebut perlu di dasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*

development), sehingga dapat menjamin keseimbangan antar pertumbuhan penduduk, kegiatannya, dan kemampuan sumber daya alam sehingga keseimbangan lingkungan dapat tetap terpelihara. Berdasarkan hal itu, maka strategi pengembangan tata ruang dalam pembangunan wilayah Kabupaten Malang berdasarkan RTRW tahun 2003 menggunakan 7 jalur upaya yaitu: jalur upaya pemanfaatan fungsi lindung, jalur optimasi penggunaan sumber daya, jalur upaya penyeimbang wilayah, jalur upaya pemanfaatan sistem aksesibilitas, jalur pemanfaatan fungsi kota dan pemukiman, jalur upaya optimasi penggunaan ruang, serta jalur upaya peningkatan efisiensi produksi dan pemanfaatan produksi.

Hal ini didukung pula oleh bapak Ir. Agus Prayitno, MT selaku Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Kabupaten Malang yaitu:

“Bahwa usaha-usaha pembangunan dan pengembangan wilayah maupun bidang-bidang prioritas yang ada di Kabupaten Malang, disesuaikan dengan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh tiap wilayah, dengan berpedoman pada prinsip kelestarian lingkungan agar keseimbangan lingkungan dapat tetap terpelihara dan dalam hal pembangunan atau pengembangan wilayah menggunakan 7 jalur upaya, sebagaimana telah dituangkan dalam RTRW Kabupaten Malang” (Wawancara hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2006, pukul 10.15 WIB, di Kantor Bappekab Malang).

c. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, sistem transportasi di Kabupaten Malang lebih didominasi oleh transportasi darat terutama jalan raya dan sebagian kereta api, sedangkan untuk transportasi laut hanya sebatas prasarana penangkapan ikan berupa TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang terletak di Sendang Biru. Sedangkan untuk transportasi udara penggunaannya masih terbatas pada kegiatan militer dan kemanusiaan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Malang, dalam upaya pengembangan sistem transportasi darat yang lebih didominasi oleh transportasi jalan raya dan kereta api, akan dilakukan dengan beberapa upaya pengembangan. Untuk transportasi jalan raya akan dilakukan beberapa upaya pengembangan, upaya pengembangan tersebut antara lain:

1. Peningkatan sistem transportasi jalan raya yang ada

Dalam upaya pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Malang ini yang menjadi dasar pertimbangan adalah:

- a. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten/Kota Malang dengan Kota Surabaya.
- b. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah-wilayah Kabupaten Malang.
- c. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Malang dengan Kabupaten lain disekitarnya.
- d. Pengembangan jaringan jalan yang mendukung konsep Malang raya, yaitu menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kota Malang dan Kota Batu.

2. Pengadaan sarana dan prasarana transportasi

Pengadaan sarana dan prasarana transportasi sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem transportasi, dalam hal ini sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan adalah terminal.

3. Pengadaan trayek angkutan

Pengadaan trayek angkutan juga sangat diperlukan untuk menunjang akses dan aliran manusia, barang dan jasa dari suatu tempat ketempat lainnya. Di wilayah Kabupaten Malang terdapat beberapa kecamatan yang memerlukan trayek

angkutan untuk menghubungkan wilayahnya, sedangkan untuk kecamatan yang sudah ada trayek dapat dikembangkan melalui peningkatan jumlah armada sesuai dengan kebutuhan.

4. Peningkatan jalan

Peningkatan jalan akan sangat dibutuhkan untuk membuka akses dan pengembangan wilayah di Kabupaten Malang.

5. Penanganan kemacetan

Penanganan kemacetan dilakukan dengan peningkatan kondisi jalan dan pelebaran atau mengembangkan jalan lingkar (ring road), misalnya di pusat-pusat kegiatan Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pakis, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Wajak, dan Gondanglegi.

6. Dimensi Jalan

Pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Malang, klas dan fungsinya disesuaikan dengan dimensi jalan menurut PP NO. 26/85 yaitu Arteri Primer, Kolektor Primer, dan Lokal Primer. (RTRW Kab. Malang Th. 2003)

Adanya kebijakan mengenai pengembangan system transportasi darat di wilayah Kab. Malang juga didukung oleh pendapat bapak Ir. Agus Prayitno, MT selaku Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Kabupaten Malang yaitu:

“Bahwa sistem transportasi Kabupaten Malang didominasi oleh transportasi darat, jadi arah pengembangannya lebih diutamakan untuk transportasi darat, karena dengan sistem transportasi yang baik tentunya akan lebih memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya dengan begitu tentunya juga akan mendukung perekonomian dari masyarakat”. (Wawancara hari Senin, tanggal 16 Oktober 2006, pukul 10.15 WIB, di Kantor Bappekab Malang).

Sedangkan untuk pengembangan sistem transportasi kereta api di wilayah Kabupaten Malang tampaknya masih belum membutuhkan adanya jalur ganda. Meskipun pada hari-hari besar seperti sabtu, minggu atau hari besar lainnya masyarakat cenderung memilih transportasi ini sehingga timbul ledakan penumpang, akan tetapi hal ini masih dapat diatasi dengan penambahan rangkaian gerbong. Sedangkan untuk transportasi udara di Kabupaten Malang yaitu Lanud Abdul Rahman Saleh, saat ini penggunaannya masih terbatas pada kepentingan militer, kemanusiaan dan pertahanan Negara.

Untuk transportasi laut Kabupaten Malang hingga saat ini belum memiliki sarana transportasi laut sebagai penunjang akses penduduk. Untuk transportasi laut di wilayah Kabupaten Malang hanya sebatas prasarana penangkapan ikan berupa TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang berada di Sendang Biru.

2. Keterpaduan perencanaan pembangunan stadion Kanjuruhan Malang dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar

a. Keterpaduan Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar.

Pembangunan stadion kanjuruhan ini merupakan perwujudan dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang, dengan dibangunnya stadion kanjuruhan ini pemerintah berharap selain menjadi prasarana yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah juga dapat memunculkan lapangan usaha baru dan mampu menyerap tenaga kerja. Dengan munculnya lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Dengan dibangunnya stadion kanjuruhan Malang pemerintah berharap akan membawa dampak sosial ekonomi yang baik bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor stadion kanjuruhan Malang, dalam lingkungan stadion kanjuruhan Malang ini terdapat beberapa jenis pekerjaan diantaranya: petugas perawatan rumput sebanyak 3 orang, petugas perawatan taman sebanyak 7 orang, petugas kebersihan sebanyak 7 orang, petugas keamanan sebanyak 8 orang, serta 7 orang staf yang 5 diantaranya berstatus sebagai PNS.

Selain para petugas stadion ini dilingkungan stadion ini juga dibangun kompleks pertokoan yang jumlahnya sebanyak 200 toko, dimana pertokoan tersebut disewakan untuk masyarakat luas dengan sewa sebesar Rp. 5.300.000/ Th. Selain kompleks pertokoan tersebut sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pedagang kaki lima, berdasarkan data yang diperoleh dari kantor stadion kanjuruhan Malang, jumlah PKL yang terdaftar sebanyak 175 orang.

Dilingkungan stadion ini juga dibangun taman bermain yang diharapkan dapat menarik wisatawan untuk datang ke stadion kanjuruhan ini. Dengan banyaknya orang yang datang/ berkunjung ke stadion kanjuruhan ini akan membawa keuntungan bagi para pedagang kaki lima. Dengan adanya keuntungan ekonomi bagi para pedagang tersebut tentunya akan juga berimbas pada kondisi sosial para pedagang tersebut.

1. Keterpaduan Dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Pembangunan stadion kanjuruhan Malang merupakan bagian dari diadakannya perencanaan tata ruang wilayah. Dengan pembangunan stadion ini pemerintah daerah berharap akan dapat membawa dampak sosial ekonomi yang baik bagi masyarakat sekitar stadion. Dengan pembangunan stadion pemerintah daerah berharap akan dapat menyerap tenaga kerja ataupun memunculkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan data yang diperoleh kantor stadion kanjuruhan jenis pekerjaan yang terdapat di stadion kanjuruhan antara lain:

1. Petugas keamanan

Dilingkungan stadion ini petugas keamanan stadion ini terdiri dari 8 orang. Petugas keamanan ini dibagi menjadi dua jam kerja, setiap jam kerja terdiri atas 4 orang petugas.

2. Petugas kebersihan

Petugas yang bertugas menjaga kebersihan stadion kanjuruhan ini terdiri dari 7 orang, ketujuh orang tersebut bekerja setiap hari untuk menjaga kebersihan stadion kanjuruhan tersebut.

3. Petugas perawatan taman

Petugas perawatan taman ini terdiri dari tujuh orang, pekerja ini bertugas merawat taman-taman yang ada di lingkungan stadion kanjuruhan Malang.

4. Petugas perawatan rumput

Pekerja yang bertugas menjaga kerapian dan kualitas rumput stadion agar tetap baik ini terdiri dari tiga orang.

5. Pedagang kaki lima

Sektor ini adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, berdasarkan data yang diperoleh dari kantor stadion kanjuruhan Malang jumlah pedagang kaki lima yang terdaftar sebanyak 175 pedagang. Dari 175 pedagang tersebut di bagi menjadi dua jenis pedagang yaitu pedagang tetap dan pedagang musiman, pedagang tetap terdapat 50 pedagang sedangkan sisanya adalah pedagang musiman.

6. Pedagang asongan

Jumlah pedagang asongan yang berjualan di lingkungan stadion kanjuruhan ini cukup banyak, berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Stadion Kanjuruhan jumlah pedagang yang terdaftar sekitar 125 orang.

7. Petugas parkir

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Stadion Kanjuruhan, jumlah petugas parkir resmi stadion berjumlah 15 orang, sedangkan untuk petugas parkir yang tidak resmi berjumlah sekitar 20 orang.

2. Keterpaduan Dengan Perubahan Pekerjaan

Dengan dibangunnya stadion kanjuruhan membawa dampak yang cukup besar terhadap sebagian penduduk yang berada di sekitar stadion kanjuruhan. Dengan pembangunan stadion kanjuruhan ada sebagian masyarakat yang berubah mata pencahariannya. Banyak masyarakat yang dulunya bertani baik itu petani penggarap maupun buruh tani beralih profesi menjadi pedagang ataupun menjadi pegawai dilingkungan stadion. Seperti yang terjadi pada bapak Ngadiono yang berasal dari Wajak, sebelum berdagang di stadion kanjuruhan beliau bekerja sebagai buruh tani di daerahnya, berikut ini kutipan wawancara dengan bapak Ngadiono:

“Dulu sebelum saya berjualan tempura disini saya bekerja sebagai buruh tani, dulu sebagai buruh tani penghasilan saya hanya sebesar Rp. 10.000/ hari. Itupun tidak setiap hari saya bekerja kalau tidak bekerja ya tidak ada penghasilan. Sejak dibangunnya stadion ini saya setiap hari berjualan tempura disini, setiap hari saya mendapat keuntungan rata-rata Rp. 20.000”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2006, pada pukul 18.30 di stadion kanjuruhan Malang)

Cerita dari bapak Ngadiono tersebut merupakan salah satu contoh perubahan pekerjaan yang terjadi pada masyarakat dengan dibangunnya stadion kanjuruhan Malang.

Hal tersebut juga terjadi pada banyak orang yang saat ini mencari nafkah dengan

berjualan dilingkungan stadion kanjuruhan , ada yang dulunya bekerja sebagai kuli bangunan, pedagang keliling, ataupun sopir. Sejak diresmikannya stadion kanjuruhan ini para pedagang kaki lima tersebut menggantungkan hidupnya dengan berjualan dilingkungan stadion ini.

Berikut ini kutipan wawancara dengan bapak Suparman yang juga berdagang di kawasan stadion kanjuruhan.

“Saya berdagang disini sejak stadion ini diresmikan oleh Presiden Megawati, setiap hari saya berdagang disini. Sebelum berdagang disini saya dulu buruh tani di desa panggung, sejak berdagang disini saya sudah tidak lagi bekerja sebagai buruh tani”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2006, pada pukul 17.00 di stadion kanjuruhan Malang)

Cerita dari kedua pedagang tersebut mewakili dari banyak pedagang yang juga berdagang di kawasan stadion kanjuruhan, mereka juga mengungkapkan hal yang sama dimana sebelum berdagang di kawasan stadion kanjuruhan mereka berlatar belakang pekerjaan yang berbeda. Semenjak dibangunnya stadion kanjuruhan mereka beralih profesi menjadi pedagang.

Selain menjadi pedagang ada juga yang saat ini bekerja sebagai staf ataupun petugas stadion, para petugas stadion ini juga berasal dari berbagai macam profesi, dan salah satunya adalah bapak Saihan, petugas keamanan yang berasal dari Gunung Kawi. Sebelum bekerja sebagai petugas keamanan di stadion kanjuruhan , bapak Saihan bekerja sebagai sopir angkutan umum. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Saihan:

“Saya dulu bekerja sebagai sopir angkutan umum, saya berasal dari gunung kawi. Saya dulu tahu pengumuman penerimaan satpam disini dikasih tahu teman terus saya ikut tes ternyata saya diterima.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2006, pada pukul 10.00 di stadion kanjuruhan Malang)

Selain bapak Saihan, hal tersebut juga terjadi pada para petugas stadion yang lain dimana mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan sejak dibangunnya

stadion kanjuruhan mereka beralih profesi sebagai petugas stadion. Salah satunya adalah bapak Taufik yang bekerja sebagai petugas perawatan rumput di stadion kanjuruhan, berikut kutipan wawancara dengan bapak Taufik

“Saya bekerja disini sejak stadion ini selesai dibangun, sebelum bekerja sebagai petugas perawatan rumput saya tidak punya pekerjaan tetap. Sekarang saya bekerja disini merawat rumput stadion, walaupun gajinya tidak cukup besar tapi bagi saya sudah cukup”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2006, pada pukul 10.30 di stadion kanjuruhan Malang)

b. Keterpaduan Dengan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Pengelolaan Pariwisata

Para pedagang kaki lima dilingkungan stadion atau tepatnya di kawasan parkir sektor utara stadion kanjuruhan ini tidak ada penataan dari petugas atau pengelola stadion. Para pedagang ini mencari tempat sendiri-sendiri tanpa adanya pengawasan atau pengaturan dari petugas stadion. Dari pengelola stadion kanjuruhan ini tidak mempunyai kebijakan yang mengatur tentang penataan pedagang kaki lima tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor stadion kanjuruhan bahwa setiap pedagang kaki lima yang berjualan dilingkungan stadion hanya diwajibkan untuk mengurus kartu tanda anggota dan mereka juga diwajibkan untuk membayar biaya pengurusan kartu anggota tersebut dengan membayar biaya pengurusan sebesar Rp.20.000. Selain biaya pengurusan kartu anggota tersebut, para pedagang setiap hari juga diwajibkan membayar iuran kebersihan sebesar Rp. 1000,-. Adanya hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Ngadiono yang juga berdagang di kawasan stadion tersebut, berikut kutipan wawancara dengan bapak ngadiono.

“Setiap pedagang di stadion ini diwajibkan mengurus kartu anggota dengan biaya pengurusan kartu sebesar Rp. 20.000, selain biaya pengurusan kartu anggota setiap pedagang juga dikenakan biaya kebersihan sebesar Rp. 1000. Biaya kebersihan tersebut dipungut setiap hari oleh petugas stadion. (Wawancara

repository.ub.ac

dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2006, pada pukul 18.30 di stadion kanjuruhan Malang)

Saat para pedagang ini sudah mulai berdatangan akan tampak pemandangan yang semrawut karena para pedagang kaki lima ini menaruh gerobak tempat mereka jualan sesuka hati mereka, sehingga tempat mereka berjualan menjadi tidak beraturan. Dengan tidak adanya pengaturan pedagang kaki lima tersebut setiap hari para pedagang harus saling berebut tempat berjualan yang mereka anggap strategis. Kesemrawutan pedagang kaki lima tersebut bisa dilihat pada gambar 1.



Gambar 1
Suasana pedagang dilingkungan stadion kanjuruhan

Gambar diatas diambil pada saat hari-hari biasa, pada hari sabtu jumlah pedagang yang berjualan yang berdagang akan bertambah banyak karena para pedagang musiman pada saat malam minggu juga berjualan. Biasanya para pedagang ini datang pada pukul 15:30, para pedagang kaki lima ini pada hari-hari biasa hanya boleh berjualan antara pukul 15:30 sampai dengan pukul 24:00, kecuali pada saat malam minggu para pedagang ini diperbolehkan berjualan sampai pagi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dengan dibangunnya stadion kanjuruhan ini, selain digunakan sebagai prasarana olah raga pemerintah juga membidik sektor pariwisata. Dengan dibangunnya stadion kanjuruhan ini pemerintah melihat adanya suatu prospek yang baik untuk sektor pariwisata, dimana dengan dikembangkannya sektor pariwisata ini selain dapat meningkatkan pendapatan pemerintah juga diharapkan akan membawa dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat sekitar stadion. Dengan banyaknya wisatawan yang datang tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan dari para pedagang yang berada dilingkungan stadion kanjuruhan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh para pedagang dikawasan stadion kanjuruhan, berikut ini kutipan wawancara dengan salah satu pedagang Bapak Suparman.

“Seharusnya pemerintah membangun sarana dan prasarana yang dapat menarik orang untuk datang ke stadion kanjuruhan ini, karena kalau orang yang datang banyak para pedagang disini juga akan mendapat keuntungan yang banyak. Seharusnya disini segera dibangun baik itu kolam renang atau fasilitas apa saja yang dapat menarik orang untuk datang ke stadion ini”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2006, pada pukul 17.15 di stadion kanjuruhan Malang)

Guna menarik wisatawan untuk datang ke stadion kanjuruhan dilingkungan stadion kanjuruhan juga dilengkapi dengan taman bermain yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk sekedar nongkrong dan bermain beserta putra-putri mereka. Selain dilengkapi dengan taman bermain, halaman parkir stadion ini juga cukup luas sehingga bisa dipakai untuk jogging maupun sekedar jalan-jalan sambil menikmati pemandangan yang bisa dikatakan cukup alami serta udara yang masih cukup bersih dan bebas dari polusi.

B. Pembahasan.

1. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.

Pada era Otonomi Daerah, semua daerah berusaha menggali dan mengembangkan sumber daya alam serta sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat. Usaha penggalian dan pengembangan ini dapat berupa pengidentifikasian setiap potensi dan permasalahan yang ada, dan diejawantahkan dalam pemanfaatan ruang serta dikemas dalam suatu produk Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pada saat ini Kabupaten Malang Menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2003. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang ini merupakan hasil penyempurnaan dari rencana tata ruang wilayah sebelumnya yaitu RTRW tahun 1998/1999-2009. Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala, yaitu setiap 5 tahun sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun tujuan dari penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan berkesinambungan melalui penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang yang telah disusun sebelumnya, berdasarkan kondisi wilayah yang berkembang pada saat ini.

Dengan demikian diharapkan nantinya dapat menghasilkan rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang dinamis (fleksibel), komunikatif, dan aspiratif melalui pendekatan *bottom up planning*, serta produk rencana tata ruang ini nantinya dapat diterima dan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Pasal 22 Ayat 2, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, materi tata ruang untuk wilayah kabupaten akan berisi sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
2. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman pedesaan dan perkotaan.
4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan.
5. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumber daya buatan

Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang tahun 2003 meliputi:

1. Kawasan Perkotaan, yang terdiri dari: kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten, kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang merubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan, dan kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan. Dengan demikian kawasan perkotaan ini terdiri dari ibu kota kabupaten (Kecamatan Kepanjen), kecamatan-kecamatan sebagai pusat SSWP (Malang, Lawang, Ngantang, Tumpang, Dampit, Kepanjen, Gondanglegi, dan Donomulyo), dan kecamatan-kecamatan lain sebagai pendukung SSWP.
2. Kawasan Pedesaan, yaitu kawasan yang arahan kegiatannya untuk pemukiman dengan fasilitas penunjangnya dan terdapat kawasan pertanian untuk kegiatan produktif.
3. Kawasan Tertentu, yaitu meliputi kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan militer, dan lain-lain.

Sedangkan penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan rincian sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung, yaitu kawasan yang ditetapkan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan

dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

2. Kawasan Budidaya, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan pemukiman dan pertanian. Karena sebagian besar wilayah kabupaten Malang terdiri dari pedesaan maka strategi pengembangan kawasan budidaya lebih berorientasi pada wilayah pedesaan, dimana kawasan pedesaan merupakan kawasan budidaya tanaman pangan.

Dengan rencana tata ruang wilayah tersebut, nantinya dipakai sebagai strategi, arahan, acuan, dan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mengembangkan wilayahnya.

a. Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang yang terbagi menjadi 33 kecamatan, dan dengan luas wilayah sekitar 3.347, 8 Km², terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/ kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan wilayah yang luas tersebut tentunya tiap-tiap wilayah memiliki potensi dan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Dengan adanya perbedaan potensi dan tingkat pertumbuhan tersebut tentunya setiap wilayah memerlukan strategi pengembangan yang berbeda pula. Dengan adanya strategi pengembangan tersebut diharapkan akan membuat pembangunan menjadi merata sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya.

Pada dasarnya suatu wilayah akan berkembang dan tumbuh sesuai dengan dinamika dan kemampuan yang dimilikinya. Jika semakin beragam dan tinggi intensitas suatu kegiatan, maka akan dapat mendorong perkembangan wilayah tersebut dengan cepat. Perkembangan wilayah ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi fisiografis wilayah, kependudukan, kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah, serta adanya interaksi sosial ekonomi antar kawasan perkotaan.

Pada dasarnya suatu wilayah yang kurang berkembang pada umumnya adalah wilayah yang terisolasi sebagai akibat dari minimnya sarana dan prasarana penunjang, dimana kondisi seperti ini biasanya terdapat di daerah pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Dengan kondisi tersebut hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan wilayah tersebut adalah dengan jalan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan perkembangan wilayah tersebut, selain itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pada wilayah yang kurang berkembang tersebut.

Dalam kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Malang, untuk memacu perkembangan dan mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah ditetapkan model regionalisasi atau pembentukan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), dimana setiap SSWP tersebut akan memiliki wilayah atau kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat SSWP, dan kecamatan lain sebagai wilayah pendukungnya. Fungsi dan peran pusat SSWP tersebut adalah sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan sebagai pusat pelayanan umum. Sedangkan bagi perkotaan kecamatan yang tidak memiliki fungsi sebagai pusat SSWP, maka perkotaan kecamatan tersebut tetap merupakan wilayah inti bagi desa-desa sekitarnya pada tingkat kecamatan.

Sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten Malang, yang sebelumnya terdiri dari 35 kecamatan, akhirnya berkurang dengan terbentuknya Kota Batu yang terdiri dari (Kecamatan Batu, Junrejo, Bumiaji), dan pada tahun 1999 terjadi pembagian wilayah Gondanglegi menjadi 2 wilayah (Gondanglegi dan Pagelaran), maka saat ini Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan. Dengan adanya perubahan ini maka berpengaruh pula pada jumlah SSWP Kabupaten Malang dimana pada RTRW sebelumnya (tahun 1998/1999-2009) ditetapkan 5 SSWP (Malang Utara, Malang Timur, Malang Selatan, Malang Tengah, dan Malang Timur Selatan), maka dalam RTRW Kabupaten Malang tahun 2003, wilayah Kabupaten Malang dibagi menjadi 8 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP).

Dengan adanya pembagian SSWP tersebut menjadi 8 SSWP, pada masing-masing pusat SSWP akan memiliki fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Berikut ini perwilayahan pembangunan di Kabupaten Malang yang sampai saat ini masih didominasi oleh sektor-sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan, dan pariwisata.

1. SSWP Lingkar Kota Malang, dengan pusat SSWP di Kota Malang dan kecamatan pendukungnya adalah Dau, Karangploso, Singosari, Pakisaji, Wagir, Tajinan, Bululawang dan Pakis. Kecamatan yang terdapat di wilayah pengembangan Lingkar Kota Malang sebagian besar memiliki pusat pelayanan sendiri tetapi masih terpengaruh kuat oleh Kota Malang sehingga cenderung berorientasi ke Kota Malang. Kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di SSWP ini

adalah: perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, perikanan darat, industri, dan pariwisata.

2. SSWP Lawang, yaitu hanya terdiri dari Kecamatan Lawang dan menjadi wilayah pengembangan tersendiri karena wilayah ini mampu melayani wilayahnya sendiri. Kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan pada SSWP ini adalah: pertanian, peternakan, industri kecil, kawasan industri, dan pariwisata alam. Pengembangan ke arah tersebut karena didukung oleh tanah yang subur, banyaknya industri (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat), potensi pariwisata alam dan peternakan.
3. SSWP Ngantang, dengan pusat SSWP di Kecamatan Ngantang. Adapun kecamatan pendukungnya adalah Pujon dan Kasembon. Kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan pada SSWP ini adalah: kegiatan wisata, perdagangan, pertanian, industri, dan perikanan air tawar. Pengembangan ke arah tersebut karena didukung oleh potensi pariwisata, lahan yang subur, banyaknya industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak susu sapi, home industri pengolahan hasil pertanian), dan perikanan air tawar.
4. SSWP Tumpang, dengan pusat SSWP di Kecamatan Tumpang. Adapun kecamatan pendukungnya adalah Poncokusumo, Wajak dan Jabung. Kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan pada SSWP ini, adalah: kegiatan wisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), peternakan, dan industri. Pengembangan ke arah tersebut karena didukung oleh tanah yang subur, banyaknya industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak, industri pengolahan hasil pertanian), dan peternakan

5. SSWP Dampit, dengan pusat SSWP di Kecamatan Dampit. (ekonomi) dan Turen (Sosial). Adapun kecamatan pendukungnya adalah Sumbermanjing Wetan, Ampelgading, dan Tirtoyudo. Kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan pada SSWP ini, adalah: pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan, pertambangan, pusat TPI di Pantai Sipelot, industri, pariwisata, dan kehutanan. Pengembangan ke arah tersebut karena didukung oleh tanah yang subur, potensi peternakan, dekat dengan pantai, banyaknya industri (home industri, pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, hasil tambang seperti kapur, marmer dan sejenisnya, serta kerajinan rakyat), potensi pertambangan yang cukup besar, potensi hutan, dan kawasan pariwisata.
6. SSWP Kepanjen, dengan pusat SSWP di Kecamatan Kepanjen. Adapun kecamatan pendukungnya adalah Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, dan Kalipare. Kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan pada SSWP Kepanjen adalah pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, pertambangan, industri, pariwisata, dan kehutanan. Pengembangan ke arah tersebut karena didukung oleh tanah yang subur, banyaknya industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil tambang seperti kapur, marmer dan sejenisnya), pertambangan (pada bagian selatan), tempat wisata, dan peternakan.
7. SSWP Gondanglegi, dengan pusat SSWP di Kecamatan Gondanglegi. Adapun kecamatan pendukungnya adalah Gedangan, Pagelaran, Bantur. Kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan pada SSWP Gondanglegi adalah: pertanian

(tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), peternakan, pertambangan, industri, pariwisata, dan kehutanan. Pengembangan ke arah tersebut karena didukung oleh tanah yang subur, tempat wisata, peternakan, banyaknya industri (home industri pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, pengolahan hasil tambang seperti kapur, marmer dan sejenisnya, serta pengolahan hasil perkebunan tebu).

8. SSWP Donomulyo, yaitu hanya terdiri dari Kecamatan Donomulyo. Kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan pada SSWP ini, adalah: pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa, pertambangan, dan pariwisata. Pengembangan ke arah tersebut karena didukung oleh potensi peternakan, perdagangan skala lokal, industri (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil tambang seperti kapur, marmer).

Dengan adanya pembagian SSWP beserta arahan kegiatannya tersebut, diharapkan nantinya akan terjadi proses *trickling down effect* yaitu proses penyaluran pusat pelayanan dari tingkat lebih tinggi atau kecamatan ke tingkat lebih rendah atau desa, sehingga pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya akan mudah tercapai dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan bila dilihat dari kegiatan yang dikembangkan pada tiap SSWP, bidang yang paling banyak diarahkan untuk dikembangkan pada seluruh SSWP adalah pertanian. Dengan demikian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Malang memiliki potensi yang besar pada sektor ini.

b. Rencana Penetapan Kawasan Prioritas Pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu proses yang terus-menerus, yang dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat menuju suatu keadaan yang dianggap lebih baik dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam upaya pembangunan di Kabupaten Malang perlu dilakukan pemerataan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkecil perbedaan tingkat perkembangan dan kesenjangan antar wilayah (wilayah maju dengan wilayah yang masih terbelakang). Sebagai konsekwensinya adalah penajaman dan pengalokasian prioritas pembangunan harus betul-betul terarah, sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan kondisi dan potensi di Kabupaten Malang, maka wilayah dan bidang yang diperkirakan memerlukan pengembangan dan perencanaan ada sekitar 7 kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Wilayah yang memiliki prospek pengembangan yang tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian sendiri. Wilayah ini merupakan wilayah yang dianggap mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang, misalnya karena adanya rencana pengembangan jaringan jalan Gempol-Malang, pengembangan jalan lingkaran barat untuk mengatasi kemacetan Lawang- Singosari, pembangunan jalan lintas selatan agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat menyamai perkembangan wilayah pantura, pengembangan jalur wisata yang menghubungkan zona-zona wisata di Kabupaten Malang, peningkatan kondisi jalur lintas timur (Pakis-Tumpang-Poncokusumo-Wajak-Turen) dan pengembangan jalur lintas barat (Pujon-Dau-Kepanjen).
- b. Wilayah yang termasuk tertinggal/ terisolasi atau kurang berkembang dan masyarakatnya relatif terbelakang. Wilayah ini terutama disebabkan oleh kondisi

alam yang kurang menunjang untuk kegiatan dan kehidupan sehari-hari, yaitu terdapat pada Kabupaten Malang bagian selatan. Berdasarkan pembagian SSWP Kabupaten Malang maka wilayah-wilayah ini masuk dalam SSWP Kepanjen yaitu Kecamatan Pagak dan Kalipare, SSWP Gondanglegi yaitu Gedangan dan Bantur, serta SSWP Donomulyo yang terdiri dari Kecamatan Donomulyo sendiri. Dengan demikian untuk wilayah ini diperlukan pengembangan:

- Kegiatan pertanian dan kerajinan.
 - Peningkatan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.
 - Pembukaan jalur transportasi yang memudahkan akses ke wilayah yang lebih maju.
- c. Wilayah yang memiliki kawasan yang rawan baik rawan bencana maupun rawan daya dukung tanah atau alamnya. Wilayah ini terdapat pada sebagian wilayah; Kecamatan Jabung, Poncokusumo, Tumpang, Ngantang, Pujon, Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Bantur, Pagak, Donomulyo, Kalipare, Wagir, dan sepanjang Pantai Selatan. Berdasarkan pembagian SSWP Kabupaten Malang maka wilayah-wilayah tersebut masuk dalam SSWP Tumpang, SSWP Ngantang, SSWP Dampit, SSWP Gondanglegi, SSWP Kepanjen, dan SSWP Donomulyo. Dengan demikian pada wilayah ini sangat ditekankan reboisasi secara bertahap dan perlu dilakukan perubahan pola pertanian dari pertanian semusim menjadi pertanian tanaman tahunan yang memiliki fungsi lindung.
- d. Kawasan dengan fungsi lindung yang mempunyai potensi terjadinya konflik penggunaan tanah akibat peralihan fungsi lahan seperti: wilayah pesisir pantai,

hutan di sepanjang hutan utama, sawah pada jalan arteri, dan sebagainya sedapat mungkin dipertahankan. apabila kawasan tersebut menjadi terpakai untuk fungsi kegiatan budidaya, maka diarahkan untuk dibatasi.

- e. Kawasan yang strategis dan memberikan prospek pengembangan yang baik bagi bidang-bidang dan komoditi unggulan. Komoditi unggulan di Kabupaten Malang tersebut adalah pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri.
- f. Meningkatkan akses transportasi laut. Hal ini dilakukan dengan pengembangan pelabuhan yang beralokasi pada Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan yaitu termasuk dalam SSWP Dampit.
- g. Kawasan strategis pengembangan jalur wisata yaitu di SSWP Tumpang (empat kecamatan) yang menghubungkan Kota Malang dengan sederetan objek wisata hingga berakhir di Gunung Bromo. Adapun paket wisata yang ditawarkan, meliputi Wendit-Rest Area Jeru-Candi Kidal dan Candi Jaho-Coban Pelangi-Ngadas-Gunung Bromo.

Pada dasarnya kemampuan sumber daya yang dimiliki setiap daerah adalah terbatas, karenanya usaha-usaha pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Malang didasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), agar keseimbangan antar pertumbuhan penduduk, kegiatannya, dan kemampuan sumber daya alam tetap dapat terpelihara. Berdasarkan hal itu, maka strategi pengembangan tata ruang dalam pembangunan wilayah Kabupaten Malang menggunakan 7 jalur upaya, yaitu:

1. Jalur Upaya Pemanfaatan Fungsi Lindung. Jalur upaya ini dikaitkan dengan tujuan untuk mewujudkan pola pembangunan yang berkelanjutan, mencakup pola penentuan kawasan budidaya dan lindung.
2. Jalur Optimasi Penggunaan Sumber Daya. Jalur upaya ini dikaitkan dengan tujuan untuk mencapai pemanfaatan yang optimal atas sumber daya alam yang tersedia, baik dilihat dari segi pembangunan sumber dayanya sendiri, maupun pengaruh-pengaruh terhadap pengembangan wilayah.
3. Jalur Upaya Penyeimbang Wilayah. Jalur ini dikaitkan dengan tujuan mencapai tingkat pemerataan yang seluas-luasnya, dengan mengupayakan tingkat keseimbangan yang mampu menumbuhkan daya tarik dan membuka kesempatan tumbuh untuk wilayah-wilayah terbelakang.
4. Jalur Upaya Pemanfaatan Sistem Aksesibilitas. Jalur ini dikaitkan dengan pencapaian tujuan pertumbuhan dan pemerataan, melalui sistem pengembangan transportasi terutama jaringan jalan regional yang terkait dengan hirarki dan fungsi kota.
5. Jalur Pemanfaatan Fungsi Kota dan Pemukiman. Jalur upaya ini dikaitkan dengan tujuan dalam rangka pencapaian keseimbangan perkembangan ruang kota dan wilayah belakangnya melalui penetapan hierarki kota yang mendukung pelaksanaan fungsi utama kota secara efisien.
6. Jalur Upaya Optimasi Penggunaan Ruang. Jalur upaya ini dikaitkan dengan tujuan penyelenggaraan fungsi-fungsi kota secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan intensitas penggunaan tanah dan tingkat kebutuhan dasar pemukiman kota.

7. Jalur Upaya Peningkatan Efisiensi Produksi dan Pemanfaatan Produksi. Jalur upaya ini dikaitkan dengan tujuan pencapaian keseimbangan perkembangan wilayah dengan mengoptimalkan sumberdaya dalam menjamin fungsi produksi yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keterkaitan ruang hunian dan ruang usaha, serta pola keterkaitan tanah yang dapat mendukung perkembangan keluarga.

c. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi

Sistem transportasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pola perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah. Untuk mencapai suatu pola perkembangan dan pertumbuhan yang baik suatu wilayah harus didukung dengan sistem transportasi yang baik pula. Apabila suatu wilayah memiliki suatu sistem transportasi yang baik tentunya mobilitas barang dan manusia dari satu tempat yang ketempat yang lain akan berjalan dengan lancar. Dengan lancarnya pergerakan barang dan manusia tersebut tentunya akan membawa dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat.

Sistem transportasi di Kabupaten Malang lebih didominasi oleh transportasi darat terutama jalan raya dan sebagian kereta api, sedangkan untuk transportasi laut hanya sebatas prasarana penangkapan ikan berupa TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang berada di sendang biru. Untuk transportasi udara penggunaannya sampai saat ini masih terbatas untuk kegiatan militer dan kemanusiaan.

Dalam rencana pengembangan sistem transportasi Kabupaten Malang, yang menjadi fokus utama pengembangannya adalah transportasi darat yang terdiri dari angkutan jalan raya dan angkutan kereta api. Sistem transportasi Kabupaten Malang yang secara keseluruhan didominasi oleh transportasi jalan raya, dengan sarana dan prasarana

yang telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan yang ada. Dalam pengembangan sampai saat ini, prasarana transportasi jalan raya telah ditingkatkan antara lain dengan pembangunan dan perbaikan jalan yang ada. Maupun pembagunan jembatan-jembatan yang dapat meningkatkan bidang perekonomian.

A. Sistem transportasi jalan raya

1. Peningkatan sistem transportasi jalan raya yang ada

Dalam pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Malang, hal yang menjadi dasar adalah:

- a. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten/Kota Malang dengan Kota Surabaya.
- b. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah-wilayah Kabupaten Malang.
- c. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Malang dengan Kabupaten lain disekitarnya.
- d. Pengembangan jaringan jalan yang mendukung konsep Malang raya, yaitu menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kota Malang dan Kota Batu.

Dengan adanya dasar pertimbangan tersebut maka hierarki jaringan jalan di kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

a. Jalan toll

Rencana jalan toll yang menghubungkan antara Malang-Gempol-Surabaya diarahkan melalui Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, dan terusan jalan toll sebagai jalan arteri primer melalui Kecamatan Pakis, terus masuk Kota Malang. Rencana jalan ini akan melalui bagian timur dari jalan arteri primer yang

ada pada saat ini. Gerbang toll direncanakan di Kecamatan Singosari dekat jalan tembus (jalan kolektor utama) yang menuju kearah Batu.

b. Jalan arteri primer

Jalan arteri ini hanya satu yakni jalan yang menghubungkan antara kota Malang dengan Surabaya. Jalan ini merupakan jalan poros utama yang melalui kecamatan Singosari-Lawang. Mengingat jalan ini sangat penting dan vital, maka sepanjang jalan ini sebaiknya penggunaan lahannya dibatasi dari kegiatan yang bersifat menarik pergerakan.

c. Jalan kolektor primer

Jaringan jalan kolektor primer ini merupakan jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang dengan Kota Kediri, Blitar, dan Lumajang. Disamping jalan yang ada saat ini, beberapa ruas jalan yang potensial untuk dikembangkan sebagai jalan kolektor primer nantinya adalah jalan lintas selatan, lintas barat (Pujon/Dau-Kepanjen), lintas timur (Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Wajak, Turen), lingkaran barat (Lawang-Singosari-menuju Batu).

d. Jalan lokal primer

Jalan lokal primer ini pada dasarnya merupakan semua jalan penghubung utama antar kecamatan yang ada dan penghubung dengan fungsi utama di Kabupaten Malang yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor. Jalan lokal primer ini juga untuk menunjang pola pergerakan antar kecamatan dengan dengan dasar sekitarnya juga direncanakan untuk pengembangan jalan lokal primer. Jalan ini terutama sebagai penunjang pergerakan manusia dan barang juga untuk mengangkut komoditi dari tempat-tempat yang jauh.

2. Pengadaan sarana dan prasarana transportasi

Agar pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dapat berjalan dengan baik tentunya pengadaan sarana dan prasarana transportasi yang baik sangat diperlukan, dengan adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik pergerakan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain akan berjalan dengan mudah. Dengan mudahnya pergerakan barang dan manusia tersebut tentunya akan membawa dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat dan pertumbuhan suatu wilayah.

Pengadaan sarana dan prasarana transportasi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem transportasi yaitu berupa terminal. Beberapa kecamatan yang memerlukan adanya sub-terminal adalah Kecamatan Ngajum, Tumpang, dan Ngantang. Berikut ini adalah table arahan pengembangan sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Malang.

Tabel
Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
di Kabupaten Malang

Kecamatan	Kondisi sarana/prasarana transportasi	Peningkatan sarana/prasarana transportasi	Lokasi atau daerah yang ditingkatkan
Ngajum	Trayek tidak ada	Kebutuhan sub terminal (depan pasar ngajum)	Kepanjen-Bajarejo-Ngasem- Ngajum-Gunung Kawi
Tumpang	Pangkalan kendaraan tidak tertata	Pengadaan sub terminal untuk menghindari kemacetan	Kota Malang-Buring- Kedungkandang-Tajinan-Candi Kidal-Tumpang-gubuklakah
Ngantang	Tidak ada sub terminal	Pengembangan sub terminal sebagai transit	Ds. Wonorejo

		moda dari Jombang, Kediri, Blitar	
Pagelaran	Jembatan rusak berat	Perbaikan jembatan yang rusak berat	Penghubung Ds. Kanigoro-Kemiri (Kepanjen)
Kepanjen	Jembatan yang terputus	Peningkatan kondisi jembatan yang terputus	Menghubungkan Ds. Kemiri-Gondanglegi

3. Pengadaan trayek angkutan

Pengadaan trayek angkutan juga sangat diperlukan untuk menunjang akses dan aliran manusia, barang dan jasa dari suatu tempat ketempat yang lain. Di Kabupaten Malang terdapat beberapa kecamatan yang memerlukan trayek angkutan untuk menghubungkan wilayahnya dan dapat dilakukan studi kelayakan, diantaranya adalah Ngajum. Sedangkan pada kecamatan yang ada trayek dapat dikembangkan melalui peningkatan jumlah armada sesuai dengan tingkat kebutuhan.

4. Peningkatan jalan

Peningkatan jalan sangat dibutuhkan untuk membuka akses dan pengembangan wilayah di Kabupaten Malang. Beberapa kecamatan yang memerlukan peningkatan kondisi jalan adalah sebagai berikut: Ngajum, Kromengan, Pagak, Kalipare, Kepanjen, Tumpang, Poncokusumo, Ngantang, Pujon, Kasembon, Wagir, Tajinan, Gondanglegi, Bantur, Donomulyo.

5. Penanganan kemacetan

Kemacetan merupakan masalah kompleks yang selalu timbul di setiap kota, apabila tidak ditangani sedini mungkin masalah kemacetan akan menjadi suatu masalah yang rumit dan nantinya akan membutuhkan dana dan waktu yang sangat banyak apabila tidak ditangani sejak dini. Penanganan kemacetan dapat dilakukan

melalui peningkatan kondisi jalan dan pelebaran atau mengembangkan jalan lingkar (ring road), misalnya di pusat-pusat kegiatan Kecamatan Lawang, Singosari, Karangploso, Dau, Kepanjen, Pakis, Tumpang, Wajak, Gondanglegi. Sebagian besar faktor yang menyebabkan kemacetan adalah karena tingginya aktivitas pasar dan tingginya arus lalu-lintas yang melintas di sepanjang jalan yang melintasi pasar.

B. Sistem Transportasi Kereta Api

Sistem pergerakan transportasi kereta api di Kabupaten Malang lebih banyak disebabkan oleh pergerakan yang menghubungkan antara Blitar-Malang-Surabaya, Malang-Jakarta melalui Blitar. Juga yang melayani Kabupaten Malang bagian selatan sampai ke Dampit akan tetapi saat ini sudah tidak berfungsi lagi.

Untuk Kabupaten Malang sistem angkutan kereta api ini tampaknya masih belum membutuhkan adanya jalur ganda, meskipun pada hari-hari besar seperti Sabtu, Minggu, atau hari besar lainnya masyarakat cenderung memilih transportasi ini sehingga timbul ledakan penumpang. Meskipun demikian ledakan ini masih dapat diatasi dengan penambahan rangkaian.

Sistem pergerakan dengan menggunakan kereta api ini akan lebih efisien jika digunakan untuk pengangkutan barang berat dalam jumlah besar dan jarak sampai jauh. Disamping tidak ada hambatan perjalanan, kereta ini mempunyai skala prioritas tersendiri dalam mengangkut barang dan penumpang. Untuk itu maka jaringan kereta api untuk jurusan Malang-Surabaya, Malang-Blitar dan bahkan Malang-Jakarta sebaiknya tetap difungsikan dan juga dapat lebih ditingkatkan pelayanannya.

C. Sistem transportasi udara dan laut

Sarana transportasi udara yang ada di Kabupaten Malang yaitu Lanud Abdul Rahman Saleh saat ini penggunaannya masih terbatas untuk kegiatan militer dan kemanusiaan. Pada dasarnya selain untuk aktivitas militer dan kemanusiaan tersebut Lanud Abdul Rahman Saleh sangat potensial untuk penerbangan umum atau komersil seperti rute Malang-Jakarta, Malang-Bali atau rute lainnya yang dapat memajukan pariwisata di Kabupaten Malang. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan TNI untuk pengembangan lapangan udara tersebut.

Sedangkan untuk sistem transportasi laut saat ini Kabupaten Malang tidak memiliki sarana transportasi laut sebagai penunjang akses penduduk, sampai saat ini transportasi laut di Kabupaten Malang hanya sebatas sarana penangkapan ikan berupa TPI (tempat Pendaratan Ikan). Akan tetapi dengan melihat potensi di pantai sendang biru dengan kegiatan perikanannya, maka untuk masa mendatang dapat dijadikan sebagai lokasi pengembangan pelabuhan skala nasional.

2. Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Stadion Kanjuruhan Malang Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar

a. Keterpaduan Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar

Pembangunan merupakan suatu wujud dari cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang. Dengan adanya pembangunan tersebut pemerintah berharap akan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat.

Dalam usaha mewujudkan cita-cita bangsa yang ingin menciptakan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut Pemerintah Daerah Malang juga

melaksanakan pembangunan. Dimana rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam suatu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang. Dengan adanya rencana tata ruang tersebut segala pembangunan yang ada di Kabupaten Malang dituangkan dalam rencana tata ruang tersebut.

Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik diperlukan adanya perencanaan yang baik dan kebijakan pembangunan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan tata ruang yang tepat dilihat dari potensi daerah. Selain itu dengan adanya perencanaan dan kebijakan yang mengatur tentang pemanfaatan tata ruang tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antar sektor dalam pembangunan daerah, sehingga dapat memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi dalam melaksanakan pembangunan hendaknya pemerintah harus selalu memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat yang berada disekitar kawasan pembangunan. Karena masyarakat yang merasakan langsung dampak dari pembangunan ataupun pengembangan tersebut adalah masyarakat yang berada disekitar wilayah atau daerah yang mengalami pembangunan. Hendaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah jangan sampai membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam PROPEDA Kab. Malang, yaitu bahwa pembangunan harus selalu memiliki keberpihakan kepada masyarakat dalam arti mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, perlu melibatkan masyarakat. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta aspiratif.

Dan dalam upaya pembangunan tersebut salah satu bentuk nyata pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah pembangunan stadion kanjuruhan. Stadion yang dibangun diatas lahan seluas 3,5 hektar dan menghabiskan dana sebesar Rp 50.774.857.900,00 bersumber dari APBD Kabupaten Malang merupakan wujud nyata pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang. Bangunan stadion yang diresmikan oleh Presiden Megawati ini juga dilengkapi dengan prasarana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Dengan pembangunan stadion ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain disediakannya sekitar 200 pertokoan masyarakat juga dapat berjualan di lingkungan stadion kanjuruhan ini. Selain berdagang masyarakat juga dapat mencari rizki dengan menjadi petugas parkir, pedagang asongan, walaupun tidak setiap hari ada kegiatan di stadion kanjuruhan ini.

1. Keterpaduan Dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Dengan dibangunnya stadion kanjuruhan diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja ataupun memunculkan lapangan pekerjaan baru. Dengan dibangunnya stadion ini tentunya akan membutuhkan beberapa tenaga kerja, dan selain itu juga dapat memunculkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Dengan pembangunan stadion ini diharapkan akan membawa dampak yang baik bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Dengan munculnya lapangan pekerjaan baru tentunya akan membawa dampak bagi masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor stadion kanjuruhan Malang, dilingkungan stadion ini dibangun sekitar 200 pertokoan. Pertokoan tersebut dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berdagang dengan membayar uang sewa sebesar Rp 5.300.000 / th. Selain kompleks pertokoan tersebut masyarakat juga dapat berdagang halaman parkir stadion, selain menjadi PKL dilingkungan stadion tersebut masyarakat juga dapat memanfaatkan dengan menjadi pedagang asongan, maupun petugas parkir.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor stadion berikut ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang muncul dengan pembangunan stadion kanjuruhan Malang:

1. Petugas keamanan

Dilingkungan stadion ini petugas keamanan stadion ini terdiri dari 8 orang. Petugas keamanan ini dibagi menjadi dua jam kerja, setiap jam kerja terdiri atas 4 orang petugas.

2. Petugas kebersihan

Petugas yang bertugas menjaga kebersihan stadion kanjuruhan ini terdiri dari 7 orang, ketujuh orang tersebut bekerja setiap hari untuk menjaga kebersihan stadion kanjuruhan tersebut.

3. Petugas perawatan taman

Petugas perawatan taman ini terdiri dari tujuh orang, pekerja ini bertugas merawat taman-taman yang ada di lingkungan stadion kanjuruhan Malang.

4. Petugas perawatan rumput

Pekerja yang bertugas menjaga kerapian dan kualitas rumput stadion agar tetap baik ini terdiri dari tiga orang.

5. Pedagang kaki lima

Sektor ini adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, berdasarkan data yang diperoleh dari kantor stadion kanjuruhan Malang jumlah pedagang kaki lima yang terdaftar sebanyak 175 pedagang. Dari 175 pedagang tersebut di bagi menjadi dua jenis pedagang yaitu pedagang tetap dan pedagang musiman, pedagang tetap terdapat 50 pedagang sedangkan sisanya adalah pedagang musiman.

6. Pedagang asongan

Jumlah pedagang asongan yang berjualan di lingkungan stadion kanjuruhan ini cukup banyak, berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Stadion Kanjuruhan jumlah pedagang yang terdaftar sekitar 125 orang.

7. Petugas parkir

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Stadion Kanjuruhan, jumlah petugas parkir resmi stadion berjumlah 15 orang, sedangkan untuk petugas parkir yang tidak resmi berjumlah sekitar 20 orang.

Dalam suatu pembangunan salah satu aspek yang sangat penting dan harus selalu diperhatikan adalah aspek guna bagi masyarakat. Karena pada dasarnya pembangunan dilakukan adalah untuk rakyat, hal ini juga selaras dengan yang tercantum dalam azas penataan ruang Kabupaten Malang, yaitu bahwa pemanfaatan ruang harus dilaksanakan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dengan tidak mengesampingkan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.

Dalam pembangunan stadion Kanjuruhan Malang tampaknya kurang begitu memperhatikan aspek bahwa yang paling utama merasakan dampak dengan adanya

pembangunan adalah masyarakat yang berada disekitar kawasan pembangunan, hal ini dapat dilihat bahwa para pekerja tetap stadion sebagian besar adalah bukan berasal dari daerah sekitar stadion kanjuruhan. Bukankah akan lebih baik apabila para pekerja stadion tersebut lebih diutamakan warga sekitar stadion. Untuk memperjelas bahwa para pekerja stadion tersebut sebagian besar tidak bersal dari warga sekitar stadion berikut ini kutipan wawancara dengan salah satu petugas perawatan taman stadion kanjuruhan Malang.

“saya bukan warga sini, saya berasal dari Gunung Kawi saya bisa bekerja disini setelah saya diberi tahu oleh bapak Saihan tetangga saya yang lebih dahulu bekerja disini sebagi petugas keamanan”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2006, pada pukul 10.00 di stadion kanjuruhan Malang)

Dengan lebih diutamakannya para pekerja dari warga sekitar tentunya masyarakat akan lebih dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Dengan adanya hal tersebut tentunya pembangunan yang dilakukan tidak akan sia-sia.

2. Keterpaduan Dengan Perubahan Pekerjaan

Dengan dibangunnya stadion kanjuruhan Malang pemerintah berharap akan dapat membawa dampak yang baik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar stadion kanjuruhan. Dengan pembangunan stadion tersebut diharapkan akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar stadion untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Mengingat dilingkungan stadion tersebut juga dibangun pertokoan, taman bermain, dan halaman parkir yang dapat dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima.

Dengan dibangunnya stadion kanjuruhan Malang, juga menimbulkan perubahan pekerjaan pada sebagian masyarakat. Dengan dibangunnya stadion tersebut telah terjadi alih fungsi lahan dimana lahan yang digunakan untuk pembangunan stadion tersebut adalah lahan pertanian. Dengan adanya alih fungsi lahan tersebut tentunya akan membawa dampak pada para petani baik petani pemilik ataupun para buruh tani yang

hidup disekitar kawasan stadion tersebut. Dengan dibangunnya stadion tersebut menyebabkan sebagian petani ataupun buruh tani kehilangan mata pencaharian mereka.

Dengan hilangnya mata pencaharian mereka tersebut menyebabkan mereka mencari pekerjaan yang lain, baik itu menjadi pedagang ataupun mencari pekerjaan yang lain. Hal-hal semacam ini tentunya juga harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menyusun RTRW yang menjadi dasar dari pola pengembangan suatu wilayah. Dalam menyusun RTRW tersebut pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat disekitar kawasan pembangunan dimana mereka inilah yang secara langsung merasakan dampak dari adanya suatu pembangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan tidak semua pedagang yang berada dilingkungan stadion tersebut berasal dari daerah sekitar stadion kanjuruhan tersebut. Ada pedagang yang berasal dari daerah Gondanglegi, Blitar, bahkan ada pedagang yang berasal dari Jepara. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Jumadi seorang pedagang kursi yang berasal dari Jepara.

“Saya berdagang kursi lipat disini sudah 2 tahun ini, saya setiap hari berdagang dari jam 4 sore sampai dengan jam 12 malam. Jumlah kursi yang saya jual tidak tentu, tetapi rata-rata setiap minggunya jumlah kursi yang saya jual sekitar 30 kursi. Kursi-kursi ini saya datangkan langsung dari jepara”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2006, pada pukul 19.30 di stadion kanjuruhan Malang)

Dengan dibangunnya stadion kanjuruhan tersebut tampaknya tidak semua masyarakat sekitar stadion dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Walaupun ada juga masyarakat yang dapat memanfaatkannya untuk mencari nafkah dengan berjualan dilingkungan stadion ini. Berikut ini kutipan wawancara dengan bapak Ngadiono yang berasal dari desa Panggung, sekitar 200 m dari stadion kanjuruhan:

“Dulu sebelum saya berjualan tempura disini saya bekerja sebagai buruh tani, dulu sebagai buruh tani penghasilan saya hanya sebesar Rp. 10.000/ hari. Itupun tidak setiap hari saya bekerja kalau tidak bekerja ya tidak ada penghasilan. Sejak dibangunnya stadion ini saya setiap hari berjualan tempura disini, setiap hari saya mendapat keuntungan rata-rata Rp. 20.000”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2006, pada pukul 18.30 di stadion kanjuruhan Malang)

Dengan adanya perubahan pekerjaan tersebut masyarakat yang dapat memanfaatkan keberadaan stadion kanjuruhan ini dapat meningkatkan pendapatan yang mereka peroleh. Dengan meningkatnya pendapatan mereka ini tentunya akan membawa dampak terhadap status sosial mereka.

b. Keterpaduan Dengan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Pengelolaan Pariwisata

Di kawasan stadion kanjuruhan Malang juga terdapat puluhan pedagang kaki lima, dimana para pedagang tersebut setiap hari berjualan di halaman parkir stadion. Para pedagang ini biasanya mulai berdagang mulai jam 4 sore hingga jam 12 malam. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan untuk bisa berdagang di lingkungan stadion para pedagang diwajibkan untuk mengurus kartu tanda anggota dan mereka juga diwajibkan untuk membayar biaya pengurusan kartu anggota tersebut dengan membayar biaya pengurusan sebesar Rp.20.000. Selain biaya pengurusan kartu anggota tersebut, para pedagang setiap hari juga diwajibkan membayar iuran kebersihan sebesar Rp. 1000,-.

Walaupun mereka yang berdagang di lingkungan stadion tersebut telah terdaftar, para pedagang di kawasan stadion menuturkan bahwa para pedagang tersebut tidak mendapatkan penataan dari petugas stadion. Setiap hari para pedagang selalu berebut tempat berjualan yang mereka anggap strategis. Dengan tidak adanya penataan pedagang tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan konflik diantara sesama pedagang. Selain berpotensi menimbulkan konflik, tidak adanya penataan pedagang tersebut juga

menyebabkan lokasi tersebut menjadi semrawut. Berikut ini gambar suasana stadion kanjuruhan saat para pedagang mulai menjajakan dagangannya.



Gambar 2
Suasana pedagang dilingkungan stadion kanjuruhan

Dengan tidak adanya penataan pedagang kaki lima tersebut tentunya sedikit banyak membawa dampak terhadap pemasukan yang diterima oleh para pedagang. Dengan tidak adanya penataan pedagang tersebut terkadang ada pedagang yang harus berjualan di tempat yang kurang strategis, padahal apabila mendapatkan penataan yang baik lokasi tersebut tentunya cukup untuk menampung para pedagang tersebut. Selain itu dengan adanya penataan yang baik tentunya lokasi tersebut akan lebih menarik sehingga akan dapat mengundang orang-orang untuk datang ke tempat tersebut.

Selain pedagang kaki lima stadion kanjuruhan ini juga berpotensi untuk dijadikan suatu objek pariwisata yang cukup baik. Hal ini tentunya juga harus diperhatikan oleh pemerintah, selain fungsi utama dari suatu pembangunan dalam menyusun suatu rencana pembangunan pemerintah juga harus dapat melihat potensi yang nantinya dapat timbul dengan adanya pembangunan tersebut.

Seperti yang terlihat pada stadion kanjuruhan dimana stadion ini memiliki wilayah yang cukup luas serta berada di suatu kawasan pertanian yang cukup subur. Dengan berbagai kelebihan dan keunikan yang terdapat di stadion kanjuruhan ini Apabila dikelola dengan baik tentunya akan banyak menarik orang untuk datang ke stadion kanjuruhan ini, selain berada disuatu wilayah dengan udara yang cukup bersih stadion kanjuruhan ini juga dilengkapi dengan taman bermain ang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sekedar nongkrong ataupun bermain bersama putra-putri mereka.

Akan tetapi tampaknya potensi pariwisata tersebut belum di manfaatkan dengan baik oleh pengelola stadion kanjuruhan tersebut. Hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya fasilitas-fasilitas pendukung untuk sektor pariwisata, stadion ini hanya dilengkapi dengan taman bermain yang pembangunannya pun terlihat hanya sekedar sebagai pelengkap. Berikut ini gambar taman bermain tersebut.



gambar 3.

Foto taman bermain Stadion Kanjuruhan Malang

Selain taman bermain tersebut kompleks pertokoan yang berada di kawasan stadion tersebut juga bisa menjadi objek yang menarik untuk mengundang masyarakat

untuk datang ke stadion kanjuruhan. Akan tetapi para pedagang di kawasan stadion kanjuruhan ini mengeluhkan mahal biaya sewa toko tersebut. Seperti yang dituturkan oleh bapak Suparman, berikut ini kutipan wawancara dengan bapak Suparman.

“Sewa toko itu terlalu mahal, sewanya Rp 5.300.000 per tahun. Disini ini yang berjualan kan mayoritas masyarakat kecil kalau disuruh bayar uang sewa yang segitu ya tidak sanggup. Seharusnya uang sewanya jangan terlalu mahal, seumpama suatu saat nanti lokasi ini sudah ramai dan pendapatan pedagang meningkat ya tidak apa-apa uang sewanya dinaikkan”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2006, pada pukul 19.45 di stadion kanjuruhan Malang)

Berikut ini suasana pertokoan stadion yang hanya di tempati oleh beberapa pedagang saja.



Gambar 4

Gambar suasana pertokoan Stadion Kanjuruhan Malang

Dengan banyaknya orang yang datang ke stadion kanjuruhan tersebut tentunya akan membawa dampak yang baik bagi para pedagang yang berada di lingkungan stadion. Dengan banyaknya orang yang datang tentunya dagangan para pedagang tersebut juga akan semakin banyak terjual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kabupaten Malang yang terbagi menjadi 33 kecamatan, dan dengan luas wilayah sekitar 3.347, 8 Km², terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/ kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Tentunya tiap-tiap wilayah memiliki potensi dan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Misalkan saja untuk daerah A mengalami kemajuan yang cukup pesat karena didukung dengan sumber daya atau potensi yang baik, sedangkan daerah B kurang bisa berkembang karena minimnya sumber daya atau potensi yang dimiliki. Apabila hal ini dibiarkan maka akan terjadi kesenjangan antar daerah.

Pada dasarnya suatu wilayah akan berkembang dan tumbuh sesuai dengan dinamika dan kemampuan yang dimilikinya. Jika semakin beragam dan tinggi intensitas suatu kegiatan, maka akan dapat mendorong perkembangan wilayah tersebut dengan cepat. Perkembangan wilayah ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi fisiografis wilayah, kependudukan, kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah, serta adanya interaksi sosial ekonomi antar kawasan perkotaan.

Pada era Otonomi Daerah, semua daerah berusaha menggali dan mengembangkan sumber daya alam serta sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat. Usaha penggalian dan pengembangan ini dapat berupa pengidentifikasian setiap potensi dan

permasalahan yang ada, dan diejawantahkan dalam pemanfaatan ruang serta dikemas dalam suatu produk Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pada saat ini Kabupaten Malang Menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2003. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang ini merupakan hasil penyempurnaan dari rencana tata ruang wilayah sebelumnya yaitu RTRW tahun 1998/1999-2009. Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala, yaitu setiap 5 tahun sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun tujuan dari penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan berkesinambungan melalui penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang yang telah disusun sebelumnya, berdasarkan kondisi wilayah yang berkembang pada saat ini.

Sedangkan tata ruang wilayah kabupaten Malang tahun 2003 terbagi menjadi tiga yaitu: kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan tertentu. Sedangkan penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terbagi menjadi dua yaitu: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dengan rencana tata ruang wilayah tersebut, nantinya dipakai sebagai strategi, arahan, acuan, dan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mengembangkan wilayahnya.

Mengingat jumlah Kecamatan yang relatif banyak dan tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malang dengan kondisi topografi dan geografis yang berbeda, serta berdasarkan orientasi pelayanan ditiap kecamatan, maka perlu adanya regionalisaasi dengan pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) baru yang sebelumnya terdiri dari 5 SSWP menjadi 8 SSWP. Pembagian SSWP Kabupaten Malang tersebut

meliputi SSWP Kepanjen, SSWP Tumpang, SSWP Ngantang, SSWP Lingkar Kota Malang, SSWP Lawang, SSWP Gondanglegi, SSWP Donomulyo dan SSWP Dampit.

Berdasarkan kondisi dan potensi di Kabupaten Malang, wilayah dan bidang yang diperkirakan memerlukan pengembangan dan perencanaan, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang Tahun 2003, adalah sebagai berikut:

1. Wilayah yang memiliki prospek pengembangan yang tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian sendiri.
2. Wilayah yang termasuk tertinggal/ terisolasi atau kurang berkembang dan masyarakatnya relatif terbelakang. Wilayah ini terutama terdapat pada Kabupaten Malang bagian selatan.
3. Wilayah yang memiliki kawasan yang rawan baik rawan bencana maupun rawan daya dukung tanah atau alamnya. Wilayah ini terdapat pada sebagian wilayah; Kecamatan Jabung, Poncokusumo, Tumpang, Ngantang, Pujon, Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Bantur, Pagak, Donomulyo, Kalipare, Wagir, dan sepanjang Pantai Selatan.
4. Kawasan dengan fungsi lindung yang mempunyai potensi terjadinya konflik penggunaan tanah akibat peralihan fungsi lahan seperti: wilayah pesisir pantai, hutan di sepanjang hutan utama, sawah pada jalan arteri, dan sebagainya.
5. Kawasan yang strategis dan memberikan prospek pengembangan yang baik bagi bidang-bidang dan komoditi unggulan. Peninjauan terhadap bidang yang potensial dan mempunyai kaitan erat dengan pengembangan wilayah adalah bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri (pengolahan komoditi-komoditi unggulan).

6. Meningkatkan akses transportasi laut. Kawasan yang diprioritaskan adalah pengembangan pelabuhan yang beralokasi pada Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
7. Kawasan strategis pengembangan jalur wisata yang memiliki prospek pengembangan baik di SSWP Tumpang (empat kecamatan) dimana kawasan ini menghubungkan Kota Malang dengan sederetan objek wisata hingga berakhir di Gunung Bromo.

Dalam pengembangan suatu wilayah tanpa didukung dengan adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Sistem transportasi di Kabupaten Malang lebih didominasi oleh transportasi darat terutama jalan raya dan sebagian kereta api, sedangkan untuk transportasi laut hanya sebatas prasarana penangkapan ikan berupa TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang terletak di Sendang Biru. Sedangkan untuk transportasi udara penggunaannya masih terbatas pada kegiatan militer dan kemanusiaan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Malang, dalam upaya pengembangan sistem transportasi darat yang lebih didominasi oleh transportasi jalan raya dan kereta api, akan dilakukan dengan beberapa upaya pengembangan. Untuk transportasi jalan raya akan dilakukan beberapa upaya pengembangan, upaya pengembangan tersebut antara lain:

7. Peningkatan sistem transportasi jalan raya yang ada
8. Pengadaan sarana dan prasarana transportasi
9. Pengadaan trayek angkutan
10. Peningkatan jalan
11. Penanganan kemacetan

12. Dimensi Jalan

Salah satu wujud pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah dibangunnya stadion kanjuruhan Malang. Bangunan stadion yang dibangun diatas tanah seluas 3,5 hektar, dan menghabiskan dana sebesar Rp 50.774.857.900 yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang. Dengan pembangunan stadion tersebut dapat menyerap beberapa tenaga kerja, sebagian besar tenaga kerja yang terserap adalah kesektor pedagang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor stadion kanjuruhan Malang, dalam lingkungan stadion kanjuruhan Malang ini terdapat beberapa jenis pekerjaan diantaranya: petugas perawatan rumput sebanyak 3 orang, petugas perawatan taman sebanyak 7 orang, petugas kebersihan sebanyak 7 orang, petugas keamanan sebanyak 8 orang, serta 7 orang staf yang 5 diantaranya berstatus sebagai PNS. Selain para pegawai stadion, dilingkungan stadion ini juga terdapat 175 pedagang, 175 pedagang tersebut terbagi menjadi dua kelompok yaitu pedagang tetap dan pedagang musiman.

Dengan adanya tenaga kerja yang terserap dan munculnya lapangan pekerjaan baru pembangunan stadion kanjuruhan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang berada disekitar stadion kanjuruhan Malang. Akan tetapi dalam rencana pembangunan stadion kanjuruhan ini tampaknya pemerintah kurang memperhatikan aspek yang berkaitan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, hal ini dapat dilihat Walaupun dilingkungan stadion tersebut terdapat pedagang permbangunan stadion tersebut tidak diikuti dengan pembangunan prasarana yang dapat menarik orang untuk datang ke stadion tersebut.

Selain permasalahan tersebut dilingkungan stadion kanjuruhan ini juga tidak terdapat penataan mengenai para pedagang, selain berpotensi menimbulkan konflik tidak adanya penataan pedagang tersebut juga menyebabkan pemandangan yang kurang menarik saat para pedagang ini mulai berdatangan. Untuk mewujudkan suatu keterpaduan antara perencanaan tata ruang wilayah dengan kondisi sosial ekonomi seharusnya pemerintah lebih memperhatikan aspek yang berkaitan dengan masyarakat, terutama aspek sosial ekonomi karena segala bentuk pembangunan yang dilakukan adalah untuk masyarakat.

B. Saran.

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat disampaikan oleh penulis, antara lain:

1. Dalam rangka mengimplementasikan perencanaan atau kebijakan pembangunan yang telah ada (RTRW), Pemerintah Kabupaten Malang hendaknya dapat melaksanakannya dengan baik, dan terhadap segala bentuk pelanggaran yang sering terjadi terutama dalam pengimplementasian di lapangan harus dikenakan sanksi hukum yang tegas. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tegas dan jelas yang mengatur tentang sanksi hukum terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana demi kesejahteraan masyarakat di daerah.
2. Dengan diprioritaskannya pembangunan sarana dan prasarana penunjang seperti sarana transportasi dan sarana umum lainnya, terutama pada daerah terpencil dan terisolasi, tentunya akan mempermudah pencapaian pemerataan pembangunan

sekaligus mempermudah akses dalam menggali potensi yang ada pada tiap wilayah.

3. Dengan lebih diperhatikannya aspek yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam penyusunan suatu rencana tata ruang wilayah, tentunya akan membuat masyarakat lebih diperhatikan, terutama masyarakat yang berada disekitar wilayah pembangunan karena masyarakat yang berada disekitar wilayah pembangunan inilah yang merasakan secara langsung dampak dari adanya suatu pembangunan.
4. Dalam lingkungan stadion kanjuruhan tentunya akan lebih menarik apabila dibangun prasarana yang dapat menarik orang untuk datang ke stadion, karena dengan banyaknya orang yang datang ke stadion tersebut tentunya hal ini akan membawa dampak yang baik bagi para pedagang tersebut
5. Dengan adanya penataan terhadap para pedagang kaki lima yang berada dilingkungan stadion kanjuruhan tentunya akan menciptakan suatu kondisi yang menarik yang pada ahirnya akan membawa dampak yang baik bagi para pedagang.
6. Untuk para pegawai atau petugas stadion dalam perekrutannya hendaknya diutamakan orang-orang yang berasal dari sekitar stadion kanjuruhan Malang, karena merekalah yang merasakan langsung dampak pembangunan stadion kajuruhan yang mana lahan yang digunakan untuk pembangunan stadion tersebut adalah lahan pertanian.
7. Untuk sektor pariwisata hendaknya lebih ditingkatkan dengan pengadaan prasarana yang mendukung untuk hal tersebut, misalnya dengan pengembangan

taman bermain yang berada di kawasan stadion kanjuruhan karena lahan yang tersedia masih cukup luas.

8. Untuk sector pariwisata akan lebih baik apabila dalam pengembangan dan pengelolaannya pemerintah dapat menggandeng pihak swasta, karena dengan menggandeng pihak swasta tentunya pemerintah akan dapat menghemat dana.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Firman B dan Sirait, S Martin. 1990. *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara
- Arikunto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press
- Gani, Abd. Yuli Andi. 1995. *Pengantar Teori Perencanaan Kota*. Malang: BPP- FIA UNIBRAW
- Hadiati, Hermin K. 1993. *Implementasi UU No. 24/1992*. Surabaya: Unair
- Hanani, AR, Nuhfil. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama
- Harjoso. 1982. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Bina Cipta
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dan Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB
- Karmisa, Isa (dkk). 1990. *Administrasi Lingkungan Dalam Kualitas Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup
- Manulang. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Miles, B dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Muh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Soekarwati. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan (Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah)*. Jakarta: Rajawali Press

Sudriamunawar, Haryono. 2002. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju

Sukirno, Sadono. 1985. *Beberapa Aspek Dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: Mandar Maju

Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Perencanaan Pemrograman dan Pengangguran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: Rajawali

Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara

Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung

Undang-undang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah

DPR RI, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Lampiran 1. Pembagian SSWP Kabupaten Malang.

